PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019

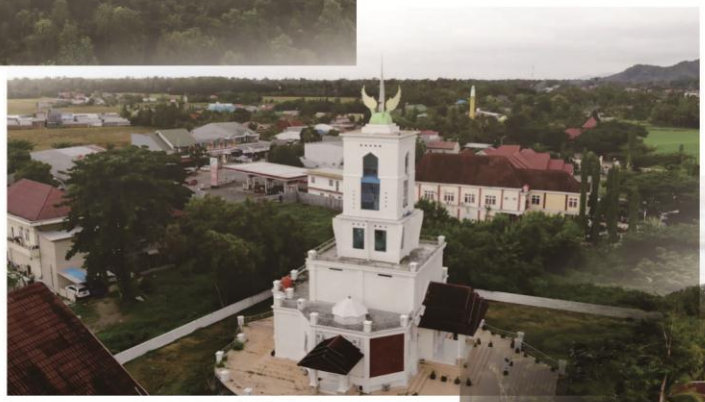

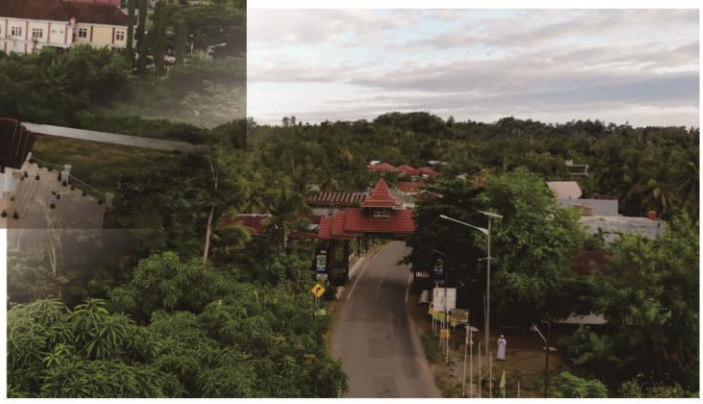

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman (Komp. Perkant. Pemkab. Luwu) No. Telp. (0471)3314239
BELOPA

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Belopa, 30 April 2020
Inspektur Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU INSPEKTORAT

SAKRI, S.Pi, M.Si
PKT Pembina Tk.I
NIP. 19680327 199710 1 001

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira dengan terbitnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2019 yang merupakan dokumen Pemerintah Kabupaten Luwu perihal pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja selama tahun 2019.

Tugas utama Eksekutif Pemerintah Kabupaten Luwu adalah melaksanakan pembangunan dan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing secara profesional, bertanggung jawab dan terkoordinasi. Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu selama tahun 2019, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Luwu Tahun 2019 sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini untuk menunjukkan kepada seluruh *stakeholder*, terutama kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome.* Disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kabupaten Luwu Tahun 2019 juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance*.

Dalam pengukurannya, LKjIP Kabupaten Luwu Tahun 2019 merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Periode 2014-2019 dan IKU pada dokumen RPJMD Periode 2019-2024. Hal ini sekaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 pada Bulan Agustus sehingga Tahun 2019 menjadi tahun transisi yang mengindikasikan transformasi sasaran dan indikator yang akan dicapai didalamnya.

Semoga penyajian LKjIP Kabupaten Luwu Tahun 2019 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanannya.

Akhirnya, saya selaku Bupati Luwu mengajak kepada seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Luwu untuk secara bersama-sama, bersungguh-sungguh, ikhlas, serta penuh semangat dengan prinsip “Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih cerah dari hari ini”, untuk dapat melaksanakan kinerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Belopa, April 2019

BUPATI LUWU

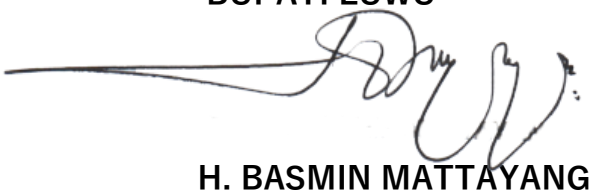

H. BASMIN MATTAYANG

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang I-1
B. Gambaran Umum I-2
Kondisi Geografis I-2
Kondisi Demografis I-4
Kondisi Perekonomian I-5
D. Kondisi Pemerintahan I-11
E. Kondisi Pegawai Negeri Sipik I-15
F. Sistematika Lakip I-16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi Misi RPJMD 2014-2019 ..... II-1
B. Tujuan dan Sasaran Visi Misi RPJMD 2014-2019 ..... II-2
C. Strategi dan Arah Kebijakan Visi Misi RPJMD 2014-2019 ..... II-6
D. Perjanjian Kinerja Visi Misi RPJMD 2014-2019 ..... II-15
F. Dukungan Porgram Terhadap Sasaran II-24
G. Visi Misi RPJMD 2019-2024 ..... II-28
H. Tujuan dan Sasaran Visi Misi RPJMD 2019-2024 ..... II-29
I. Strategi dan Arah Kebijakan Visi Misi RPJMD 2019-2024 ..... II-39
J. Perjanjian Kinerja Visi Misi RPJMD 2019-2024 ..... II-52

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2019 ..... III-2

1. Capaian Kinerja Misi 1 .....III-5

2. Capaian Kinerja Misi 2 .....III-17

3. Capaian Kinerja Misi 3 .....III-25

4. Capaian Kinerja Misi 4 .....III-30

5. Capaian Kinerja Misi 5 .....III-35

6. Capaian Kinerja Misi 6 .....III-49

7. Capaian Kinerja Misi 7 .....III-53

B. Realisasi Anggaran III-56

1. Pendapatan Asli Daerah III-57

2. Belanja Daerah III-58

BAB IV PENUTUP IV-1

A. Permasalahan IV-1

B. Solusi IV-2

Ringkasan Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan diandalkan. Tahun 2019 merupakan tahun kelima dan sekaligus terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2014-2019.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan guna mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 dimana Laporan Kinerja Kabupaten Luwu tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan tahun 2019 di dalam RPJMD 2014-2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 30 indikator kinerja utama, disimpulkan diketahui dimana diketahui bahwa terdapat **21 indikator atau 70,0% dengan kategori capaian "Sangat Tinggi"**, **5 indikator atau 16,7% dengan kategori "Tinggi"**, **1 indikator dengan kategori "Sedang"**, **2 Indikator atau 6,7% berkategori "Rendah"** dan **hanya 1 indikator atau sama dengan 3,3% dengan kategori "Sangat Rendah"** Capaian-capaian ini kemudian menjadi salahsatu tolak ukur capaian Kepala Daerah selama periode masa jabatannya yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode lima tahun mendatang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2024 mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-Azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (Tiga) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun setelah tahun anggaran berakhir menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota kabupaten adalah Kota Belopa. Ibukota Kabupaten Luwu sebelumnya adalah Kota Palopo namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu, maka Ibukota Kabupaten Luwu dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sebagai pusat pemerintahan akibat hal tersebut maka wilayah Kabupaten Luwu terbagi menjadi 2 (Dua) wilayah yang dipisahkan oleh wilayah Kota Palopo yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Luwu sehingga wilayah perbatasan Kabupaten Luwu berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara

Sebelah Timur : Teluk Bone

Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap dan Kota Palopo

Sebelah Barat : Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja utara dan Kabupaten Enrekang

Luas wilayah Kabupaten Luwu tercatat 3.000,25 km2, menurut ketinggian daerah sebagian besar wilayah Kabupaten Luwu berada di ketinggian 100 m ke atas atau sekitar 64% sisanya sekitar 36% wilayah berada pada ketinggian 0-100 m. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten

Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yang dibagi habis menjadi 207 Desa dan 20 Kelurahan. Sebagaimana terterah pada tabel I sebagai berikut:

Tabel I.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Luwu

NO.	KECAMATAN	JUMLAH	
		DESA	KELURAHAN
1.	Larompong Selatan	9	1
2.	Larompong	12	1
3.	Suli Barat	7	1
4.	Suli	12	1
5.	Belopa	5	4
6.	Belopa Utara	6	2
7.	Bajo	11	1
8.	Bajo barat	9	-
9.	Latimojong	12	-
10.	Basse Sangtempe	12	-
11.	Basse Sangtempe Utara	12	-
12.	Kamanre	7	1
13.	Ponrang Selatan	12	1
14.	Ponrang	8	2
15.	Bua Ponrang	9	1
16.	Bua	14	1
17.	Walenrang	8	1
18.	Walenrang Utara	10	1
19.	Walenrang Timur	8	-
20.	Walenrang Barat	6	-
21.	Lamasi	9	1
22.	Lamasi Timur	9	-

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018

Sebagaimana yang tersaji pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapa wilayah kecamatan yang belum memiliki wilayah administrasi kelurahan didalamnya. Adapun luas wilayah masing-masing seperti yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2 Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2019

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)	%
1	Larompong	Larompong	12	1	225,25	7,51
2	Larompong Selatan	Bonepute	9	1	131	4,37
3	Suli	Suli	12	1	81,75	2,72
4	Suli Barat	Lindajang	7	1	153,5	5,12
5	Belopa	Tampumia Radda	5	4	59,26	1,98
6	Kamanre	Cilallang	7	1	52,44	1,75
7	Belopa Utara	Pammanu	6	2	34,73	1,16
8	Bajo	Bajo	11	1	68,52	2,28
9	Bajo Barat	Bonelemo	9	-	66,3	2,21
10	Bassesangtempe	Lissaga	12	-	178,12	5,94
11	Latimojong	Kadundung	12	-	467,75	15,59
12	Bassesangtempe Utara	Pantilang	12	-	122,88	4,10
13	Bupon	Noling	9	1	182,67	6,09
14	Ponrang	Padangsappa	8	2	107,09	3,57
15	Ponrang Selatan	Pattedong	12	1	99,98	3,33
16	Bua	Bua	14	1	204,01	6,80
17	Walenrang	Batusitanduk	8	1	94,6	3,15
18	Walenrang Timur	Tabah	8	-	63,65	2,12
19	Lamasi	Lamasi	9	1	42,2	1,40655
20	Walenrang Utara	Bosso	10	1	259,77	8,65828
21	Walenrang Barat	Ilan Batu	6	-	247,13	8,23698
22	Lamasi Timur	To'lemo	9	-	57,65	1,92151
Jumlah			**207**	**20**	**3000,25**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018

Tabel diatas menggambarkan luas wilayah masing-masing kecamatan, dimana Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 km2 atau sekitar 15,59% dari luas seluruHKabupaten Luwu, menyusul Kecamatan Walenrang Utara dengan luas 259,77 km2 atau sekitar 8,66% sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil

adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km2 atau hanya sekitar 1,16% dari luas Kabupaten Luwu.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2019 adalah sebesar 369.642 jiwa yang terdiri dari 185.635 jiwa Laki-Laki dan 183.907 Perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2018-2019 sebesar 0,78%. Jumlah rumah tangga keadaan akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 78.112 rumah tangga dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4-5 orang. Jumlah rumah tangga ini terbanyak di Kecamatan Bua sekitar 7.297 rumah tangga dan terkecil di Kecamatan Latimojong dengan jumlah rumah tangga hanya tercatat 1.600 rumah tangga. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu yang terus bertambah setiap tahunnya tersebar di berbagai kecamatan dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 8.83% dari jumlah penduduk Kabupaten Luwu sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar 1,65%

Sementara jika dilihat dari kepadatan penduduk per km2, Kecamatan Lamasi merupakan daerah terpadat yaitu 537.27 penduduk per km2 dengan luas wilayah hanya 1,41% dari luas Kabupaten Luwu, sementara yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya terdapat di Kecamatan Latimojong yaitu hanya 13,07 penduduk per km2 dengan luas wilayah 15,59% dari luas Kabupaten Luwu.

C. KONDISI PEREKONOMIAN

1. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Sasaran pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan proses jangka panjang dari suatu pemerintahan dengan sasaran utama proses tersebut adalah bagaimana usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses pembangunan ekonomi adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Meskipun Kabupaten Luwu yang sekarang adalah merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo namun potensi perekonomiannya masih cukup tinggi. Hal ini Nampak Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,19 persen pertahun, pada tahun 2015 mencapai 7,26 persen dengan nilai PDRB sebesar 7.437,42 milyar rupiah dan pada tahun 2016 naik menjadi menjadi 7,88 persen dengan nilai PDRB sebesar 8.023,37 milyar rupiah, untuk tahun 2017 meskipun nilai PDRB lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun Laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 6,79 persen dengan nilai PDRB sebesar 8.567,87 milyar rupiah, kemudian pada tahun 2018 naik menjadi 6,86 persen dengan nilai PDRB sebesar 9.155,58 milyar rupiah, dan pada tahun 2019 Laju pertumbuhan ekonomi kembali turun menjadi 6,26 persen dengan nilai PDRB sebesar 9.728,97 persen. Sumber utama pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu menurut lapangan usaha di sokong oleh sector pertanian, kehutanan dan Perikanan, sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda, sektor konstruksi dan sektor r*eal estate*.

Tabel I.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.756,05	6,48	4.046,08	7,79	4.267,80	5,41	4.565,06	6,97	4.747,14	3,98
B	Pertambangan dan Penggalian	168,83	6,06	184,04	9,01	200,41	8,89	212,83	6,20	227,42	6,86
C	Industri Pengolahan	330,20	4,44	359,81	8,97	387,11	7,59	414,03	6,95	457,47	10,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,53	(7,24)	10,07	18,13	10,67	5,90	11,47	7,49	11,93	4,09
E	Pengadaan Air	1,18	0,56	1,30	10,02	1,41	8,47	1,50	6,31	1,56	3,83
F	Konstruksi	646,04	5,31	676,59	4,99	712,78	5,09	756,96	6,20	823,64	8,81
G	Perdaganan Besar dan Eceran,Reparasi dan Sepeda Motor	864,50	9,33	943,16	8,60	999,37	6,44	1.080,04	8,07	1.173,45	8,65
H	Transportasi dan Pergudangan	59,15	6,68	61,94	4,72	65,73	6,12	74,81	13,82	81,81	9,36
I	Penyediaan Akodasi dan Makanan dan Minuman	54,01	6,30	58,20	7,77	61,63	5,89	68,40	10,98	72,56	6,09
J	Informasi dan Komunikasi	218,10	14,69	237,43	8,86	258,05	8,69	281,68	9,16	309,75	9,97
K	Jasa Keuangan	104,32	10,31	120,24	15,25	126,83	5,48	130,80	3,13	136,65	4,47
L	Real Estate	452,54	6,75	484,98	7,17	517,08	6,62	541,09	4,64	572,49	5,80
M,N	Jasa Perusahaan	1,79	11,67	1,95	9,14	2,19	12,34	2,37	7,99	2,56	8,09

Kategori	Lapangan Usaha	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK) & LAJU PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN									
		2015		2016		2017		2018		2019	
O	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	344,66	6,24	372,23	8,00	389,60	4,67	398,37	2,25	446,86	12,17
P	Jasa Pendidikan	255,29	13,57	279,76	9,59	302,25	8,04	329,74	9,09	354,86	7,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151,70	14,54	163,39	7,71	240,35	47,10	258,38	7,50	278,88	7,93
R,S,T,U	Jasa Lainnya	20,53	10,26	22,19	8,08	24,62	10,96	27,64	12,25	29,93	8,31
PDRB Luwu		**7.437,42**	**7,26**	**8.023,37**	**7,88**	**8.567,87**	**6,79**	**9.155,16**	**6,86**	**9.728,96**	**6,26**

Sumber: Kabupaten Luwu Dalam Angka 2018

2. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah meskipun belum tentu menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk secara riil. Berdasarkan perhitungan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu pada tahun 2015 sebesar Rp29.589 milliar. Selanjutnya pada tahun berikutnya terus meningkat menjadi Rp33.573 milliar pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebesar Rp36.603 milliar, pada tahun 2018 sebesar Rp40.200 milliar, dan pada tahun 2019 mencapai Rp43.250 milliar, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,78 persen pertahun.

Untuk PDRB Perkapita Atas dasar Harga Konstan meskipun pertumbuhan lebih rendah jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku namun dari tahun 2015-2017 juga terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,38 persen per tahun. PDRB Perkapita Kabupaten dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel I.4 PDRB Perkapitan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 (dalam milyar rupiah)

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai	Pertumbuhan (%)	Nilai	Pertumbuhan (%)
2014	25.982,00	-	19.977,00	-
2015	29.589,00	13,88	21.237,00	6,31
2016	33.573,00	13,46	22.711,00	6,94
2017	36.603,00	9,03	24.046,00	5,88
2018	40.200,00	9,83		
2019	43.250,00	7,59		

Sumber : BPS Kab. Luwu

3. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di daerah yang mejadi focus kerja pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota, berbagai cara yang telah dilakukan untuk menekan angka

kemiskinan, namun upaya tersebut belum juga mampu menekan angka kemiskinan secara maksimal.

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu pada tahun 2019 turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mana pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu sebesar 48.680 jiwa, tahun 2016 naik menjadi 50.580 jiwa yang berarti ada pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.940 jiwa, kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 49.800 jiwa begitupun pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 47.910 jiwa, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 46.180 jiwa. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 Kabupaten Luwu berada pada urutan ke-5 jumlah penduduk miskin tertinggi setelah Kabupaten Jeneponto, Pangkep, Luwu Utara dan Selayar.

Gambar 1.1. Garfik Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2019

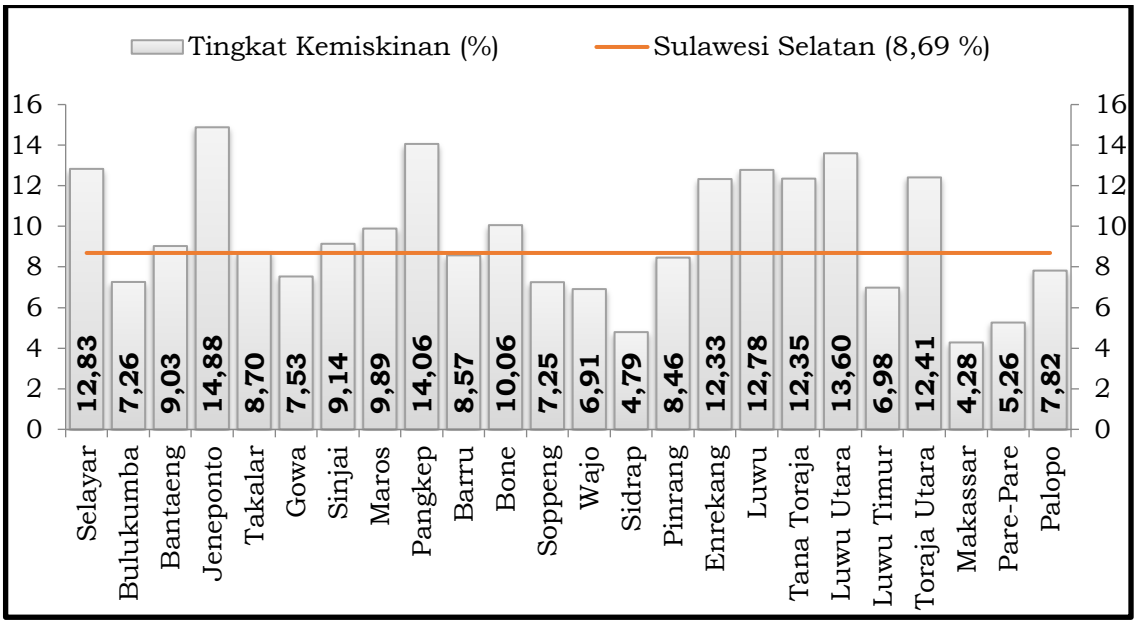

Sumber Data : BPS Provinsi Sul-Sel

4. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan alat ukur dalam menentukan seberapa besar ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah pada periode tertentu. Ukuran kesenjangan indeks gini berada pada besaran 0 (nol) sampai 1 (satu). Nilai 0 pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna,

maka semakin besar nilai rasio Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran dalam suatu wilayah. Skala indeks gini rasio terdiri dari:

- ✓ Ketimpangan rendah bila gini ratio ≤ 0,30
- ✓ Ketimpangan sedang bila gini ratio antara 0,30 hingga 0,50
- ✓ Ketimpangan tinggi bila gini ratio ≥ 0,50

Berdasarkan skala gini ratio, maka gini ratio Kabupaten Luwu selama tahun 2015-2019 berada pada angka ≥ 0,30 dan lebih ≤ 0,50 sehingga mengindikasikan ketimpangan pendapatan tergolong skala sedang.

Gambar 1.2. Gini Ratio Kabupaten Luwu Tahun 2015-2019

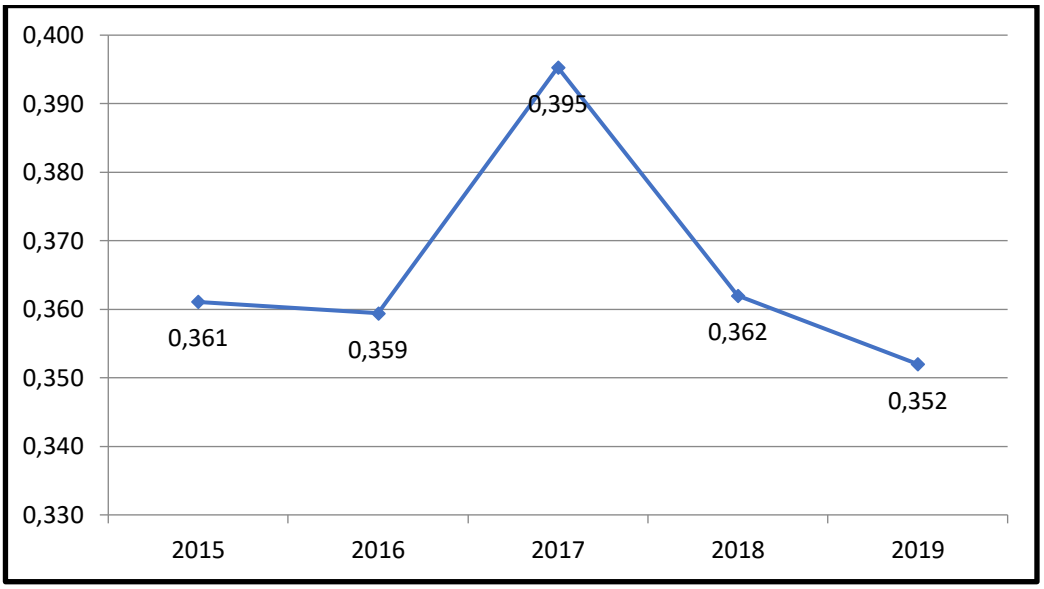

Sumber : BPS Kab. Luwu

D. KONDISI PEMERINTAHAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Susuna Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Perumahan dan Permukiman
7. Dinas Sosial
8. Dinas Perhubungan
9. Dinas Pariwisata
10. Dinas PUPR
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Pertanian
20. Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Dinas Pertanahan
22. Dinas Perdagangan
23. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
24. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
25. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
26. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
27. Dinas Satpol PP
28. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
29. Badan Pengelola Keuangan Daerah
30. Badan Penaggulangan Bencana Daerah
31. Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
32. Badan Pendapatan Daerah
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Inspektorat

35. RSUD Batara Guru
36. Kecamatan-Kecamatan

Tabel I.5 Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
1.	Pendidikan	Pendidikan Dasar, PAUD dan Non Formal
2.	Kesehatan	Pengelolaan UKP & UKM dan Rujukaan Tingkat kabupaten
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Jalan di Kabupaten & Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan Imprastruktur pada Permukiman di Daerah
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan gangguan & Ketertiban Umum Penangakan PERDA & PERBUB
6.	Sosial	
NO.	**URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)**	**KETERANGAN**
1.	Tenaga Kerja	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3.	Pangan	
4.	Pertanahan	
5.	Lingkungan Hidup	
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pemaduan & sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
		Pengendalian Kualitas Penduduk. 2. Pelaksanaan Advokasi,komunikasi,informasi & edukasi (KIY) pengendalian Penduduk KB keahrifan Budaya lokal
9.	Perhubungan	1.Penetapan rencana induk LLAJ 2.Penerbitan Izin usaha angkutan laut yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas daerah 3.Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan Helikopter
10.	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Mikro
12.	Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi
13.	Kepemudaan dan Olahraga	Pemberdayaan & Pengembangan Organisasi Kepemudaan & Keolahragaan
14.	Statistik	Penyelenggaraan statistic sektoral
15.	Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah
16.	Kebudayaan	Pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi & pembinaan lembaga adat
17.	Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan & Pembudayaan gemar membaca
18.	Kearsipan	Pengelolaan Arsip
NO.	**URUSAN PILIHAN**	**KETERANGAN**
1.	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan & penyelenggaraan TPI & pemberdayaan nelayan kecil

NO.	URUSAN WAJIB (PELAYANAN DASAR)	KETERANGAN
2.	Pariwisata	Pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategi pariwisata & destinasi pariwisata
3.	Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana & pengembangan sarana pertanian
4.	Perdagangan	Pembangunan & pengelolaan sarana distrubusi perdagangan
6.	Perindustrian	Penetapan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
7.	Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk kawasan transmigrasi dan penataan kesebaran penduduk yang berasal dari satu daerah

E. KONDISI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan data Sistem Informasi Kepergawaian atau “SIMPEG” Tahun 2019 sebanyak 5.743 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.229 orang dan perempuan sebanyak 3.514 orang.

Tabel I.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Berdasarkan Data SIMPEG Tahun 2019

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD/Sederajat	6	0	6
2.	SLTP/Sederajat	18	1	19
3.	SLTA/Sederajat	448	296	744
4.	Diploma I	4	15	19
5.	Diploma II	39	74	113
6.	Diploma III	76	436	512

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7.	Diploma IV	17	56	73
8.	Strata I	1437	2471	3908
9.	Strata II	183	165	348
10.	Strata III	1	0	1
	Jumlah	**2229**	**3514**	**5743**

F. SISTIMATIKA LAKIP

Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kenerja pemerintah Kabupaten luwu selama tahun 2019. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana kenerja (*Performance Plan*) 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2019 sesuai dengan pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ihktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja

Pada sub bab ini disajikan Evaluasi dan analisis dari kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis serta indicator sasaran

c. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu

Pada sub bab ini disajikan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Misi Periode 2014-2019

RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Menengah Daerah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, dimana tahun 2019 ini merupakan periode akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2019 yang juga merupakan masa transisi kepemimpinan di Kabupaten Luwu pasca pemilihan umum serentak tahun 2018. Secara umum program/kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2019 merupakan isu–isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Luwu dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang dihadapi dalam 5 tahun periode kepemimpinan Bupati H.A.MUDZAKKAR dan wakil Bupati H.AMRU SAHER membuat Visi Kabupaten Luwu tahun 2014-2019 sebagai berikut:

"**TERWUJUDNYA KABUPATEN LUWU YANG LEBIH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING YANG BERNUANSA RELIGIUS**"

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

1) Lebih maju artinya : Mengarah pada kondisi yang mempunyai nilai lebih bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
2) Lebih Mandiri artinya : Merupakan keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada daerah lain sejak berdirinya kabupaten sudah terbiasa sehingga bebas dari ketergantungan pada daerah lain.
3) Lebih Berdaya saing artinya : Merupakan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi

dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestic dan regional serta nasional.

4) Dan Bernuansa Religius merupakan wadah dari ketiga pokok visi diatas.

Visi Kabupaten Luwu tersebut berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Luwu yang termuat dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025, yaitu **"LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI"**

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2014-2019, dijabarkan kedalam beberapa Misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;
2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;
3) Membangun Desa dan Menata Kota;
4) Peningkatan kualitas Infrastruktur dan tata ruang wilayah;
5) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah;
6) Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
7) Meningkatkan Keamanan dan ketertiban masyarakat;

B. Tujuan dan Sasaran Periode 2014-2019

Tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019, dalam setiap misi pembangunannya adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur,

Tujuan:

1. Mewujudkan Pelayanan publik yang prima.
2. Meningkatkan kualitas Birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif.

Sasaran:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik
3. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan,

Tujuan:

1. Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas

Sasaran:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan.
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Misi Ketiga : Membangun Desa dan Menata Kota,

Tujuan:

1. Meningkatkan aksesbilitas terhadap infrastruktur desa

Sasaran:

1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan serta sarana dan prasarana perkotaan

Misi Keempat : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah,

Tujuan:

1. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya

Sasaran:

1. Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas

Misi Kelima : Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah

Tujuan:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

Sasaran:

1. Meningkatnya daya saing usaha pertanian.
2. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan
4. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan

Misi Keenam : Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan:

1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan Pembangunan

Sasaran:

1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana.

Misi Ke-tujuh : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,

Tujuan:

1. Meningkatkan stabilitas di daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Periode 2014-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas	1. Predikat Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Persentase Capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pegawai ASN
2.	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 4. Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk
3.	Meningkatnya Profesionalisme	5. Predikat AKIP

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur	6. Persentase Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur
4.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	7. Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A) 8. Angka rata-rata lama sekolah (SD) 9. Angka Partisipasi Kasar (APK) 10. Angka Partisipasi Murni (APM) - SD/Paket A - SMP/Paket B
5.	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau	11. Angka Usia Harapan Hidup (AHH) 12. Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani
6.	Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan	13. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik 14. Jumlah Pembangunan Jembatan 15. Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi 16. Persentase *Traffic Light* yang berfungsi baik
7.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas	17. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih 18. Persentase RT bersanitasi 19. Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA
8.	Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian	20. Jumlah Produktivitas padi per hektar 21. Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB
9.	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri	22. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 23. Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha
10.	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan	24. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil 25. Persentase Koperasi Aktif
11.	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan	26. Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya) 27. Cakupan bina kelompok nelayan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
12.	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana	28. Persentase Ketaatan terhadap RTRW
13.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum	29. Persentase Kepatuhan terhadap Perda 30. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

C. Strategi dan Arah Kebijakan Periode 2014-2019

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Luwu mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2014-2019 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategik juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dSalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*Strategi focussed management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksud untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar

lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya.

Adapun strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius			
Misi I : Meningkatkan profesionalisme Aparatur			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan Pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatkan kualitas Birokrasi yang professional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif.	➢ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas. ➢ Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik. ➢ Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	1. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah 3. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan; 4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi 5. Penataan struktur organisasi yang proporsional 6. Peningkatan pelayanan administrasi organisasi 7. Penuntasan kejelasan batas administrasi wilayah dalam Kabupaten Luwu 8. Peningkatan transparansi dan akuntabiltas dalam penganggaran, 9. Pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah, 10. Peningkatan pelayanan pengelolaan danpelaporan Keuangan Daerah 11. Mengusahakan predikat WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah,

			12. Peningkatan Penerimaan Daerah sesuai dengan Potensi Wilayah, 13. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 14. Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan asset-aset daerah yang masih bermasalah, 15. Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 16. Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 17. Penataan pengelolaan buku dan arsip daerah dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
		2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat	1. Peningkatan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa, 2. Peningkatan pembinaan bagi aparat desa, 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
Misi II : Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan			
3. Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.	➢ Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan ➢ Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	1. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan.	1. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. 2. Peningkatan kualifikasi pendidik minimal strata pendidikan D4/S1. 3. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga

			kependidikan.
		2. Peningkatan kapasitas SDM tenaga medis dalam daerah	1. Mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pengiriman tugas belajar 2. Meningkatkan kesejahteraan para medis berbasis kinerja. 3. Meningkatkan kemampuan duplikasi kompetensi bagi sesama tenaga medis.
Misi III : Membangun desa dan menata kota			
4. Meningkatkan aksesbilitas terhadap infrastruktur dasar	➢ Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan	1. meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar	1. Pembangunan jalan disentra pertanian, dan wisata 2. Sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah. 3. Pembangunan sumber-sumber air bersih di desa. 4. Penyediaan air minum daerah perkotaan dengan kategori daerah dengan masyarakat berpenghasilan rendah. 5. Pembangunan pembangkit listrik tenaga hydro.
Misi IV : Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah			
5. Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerahyang berkualitas dan merataserta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya	➢ Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	1. Meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang**,** barang dan jasa	1. Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat.
		2. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air	1. peningkatan konservasi sumber daya air; 2. peningkatan pendayagunaan sumber daya air 3. peningkatan pengendalian daya rusak air, 4. pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.

3. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	1. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum; 2. Peningkatan cakupan layanan persampahan; 3. Peningkatan ketersediaan drainase perkotaan; 4. Pengembangan lingkungan permukiman sehat;
4. Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pemanfaatan ruang	1. Perwujudan mewujudkan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang dalam wilayah kabupaten Luwu; 2. Peningkatan kinerja perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan	1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian. 2. Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni
6. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman	1. Peningkatan cakupan layanan persampahan;
7. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang nyaman.	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar perhubungan.

		8. Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenaga listrikan	1. Meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan.
		9. Mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi dan air tanah	1. Meningkatkan teknologi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; 2. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya mineral, geologi, dan air tanah;
MISI V : Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	➢ Meningkatnya daya saing usaha pertanian. ➢ Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi. ➢ Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan. ➢ Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan	1. Melalui strategi memperluas kesempatan kerja	1. penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
		2. Meningkatkan investasi.	1. penciptaan iklim usaha yang kondusif.
		3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.	1. peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; 2. peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.
		4. Meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman dan keamanan pangan.	1. Peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan.
		5. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih	1. mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan.

fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.	
6. Meningkatkan produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan dan peternakan.	1. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; 2. Peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; 3. peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak 4. pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan.
7. Meningkatkan produksi dan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan.	1. peningkatan produksi perikanan dan kelautan 2. peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan.
8. Meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan.	1. Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
9. Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli.	1. Pengembangan pariwisata dan produk wisata;

		10. Meningkatkan daya saing industri.	1. Peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan kemitraan antar industri; 2. Peningkatan produksi dan kualitas produk unggulan (industri kreatif)
		11. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional.	1. peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien;
MISI VI : Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan			
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan	Meningkatnya daya dukung dan daya tamping lingkungan serta kualitas penanganan bencana	1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana.	1. Peningkatan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri; 2. Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
		2. Meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung.	1. Peningkatan kualitas pengelolaan kawasan hutan lindung dan non hutan.
		3. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup.	1. peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan 2. peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut.
MISI VII : Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat			
Meningkatkan stabilitas di Daerah	Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum	1. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Hak dan Kewajiban	1. Meningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan politik. 2. Peningkatanperan serta masyarakat dalam pembangunan politik.

		Politik sebagai Warga Negara.	3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu.
		2. Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara.	1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan negara.
		3. Menata sistem hukum di daerah.	1. Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 2. Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah.
		4. Meningkatkan budaya taat hukum.	1. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM.
		5. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.	1. Peningkatan pembinaan siskamling 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas Satpol Pamong Praja

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Periode 2014-2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukurk inerja sebagai dasarevaluasikinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja. Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan Perjanjian Kinerja awal Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Sesuai RPJMD Periode 2014-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas	Predikat Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini/Nilai	WTP/75
		Persentase Capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pegawai ASN	%	90
2	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100
		Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	98
3	Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur	Predikat AKIP	Kategori SAKIP	B
		Persentase Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	%	70
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A)	%	81
		Angka rata-rata lama sekolah(SD)	Tahun	8,3
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	100
		Angka Partisipasi Murni(APM) - SD/Paket A - SMP/Paket B	%	99,50 93
5	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,8
		Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	%	100
6	Meningkatnya Pemeliharaan	Persentase Panjang Jalan	%	28,01

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan	dalam Kondisi Baik		
		Jumlah Pembangunan Jembatan	Unit	35
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	%	45
		Persentase Traffic Light yang berfungsi baik	%	100
7	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	84
		Persentase RT bersanitasi	%	86,89
		Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA	%	81
8	Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian	Jumlah Produktivitas padi per hektar	Ton/ hektar	7,6
		Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	55
9	Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	14
		Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	9
10	Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	35.000
		Persentase Koperasi Aktif	%	15
11	Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan	Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya)	Ton	700.000
		Cakupan bina kelompok nelayan	Klmpk	70
12	Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	95
13	Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik	Persentase Kepatuhan terhadap Perda	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	dan Hukum	Cakupan patroli petugas satpol PP	kali	80

E. Indikator Kinerja Utama Periode 2014-2019

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Luwu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (sesuai indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2014-2019) untuk tingkat Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk tahun akhir RPJMD ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Periode 2014-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI IKU	PROGRAM/KEG.	OPD TERKAIT
1.	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas**	1. Predikat Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil evaluasi/opini BPK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
		2. Persentase Capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pegawai ASN	Jumlah pegawai dengan capaian SKP yang bernilai "Baik" di lingkungan Pemkab. Luwu terhadap Jumlah Pegawai ASN di Lingkungan Pemkab. Luwu x 100%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM
2.	**Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik**	3. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Hasil Survey IKM	Program Penguatan Kualitas Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal	DPM-TPSP
		4. Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	Jumlah Penduduk Yang Berumur +17 Tahun Yang Ber KTP terhadap jumlah penduduk usia +17 tahun x 100%	Program Penataan Administrasi kependudukan	DUKCAPIL
3.	**Meningkatnya Profesionalisme dan**	5. Predikat AKIP	Nilai/hasil evaluasi AKIP yang dikeluarkan oleh Men PAN	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA LITBANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI IKU	PROGRAM/KEG.	OPD TERKAIT
	Kualitas Kesejahteraan Aparatur	6. Persentase tingkat pengembangan kompetensi SDM aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi SDM aparatur sesuai analisis kebutuhan Pengembanganterhadap Jumlah pegawai dilingkungan Pemkab. Luwu x 100 %	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKPSDM
4.	**Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan**	7. Persentase Ruang Kelas dalamkondisi baik (SD)	Jumlah Ruang kelas kondisi baik periode tertentu terhadap jumlah ruang kelas seluruhnya periode tertentu di Kab. Luwu x 100%	Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	DINAS PENDIDIKAN
		8. Angka rata-rata lama sekolah	Jumlah tahun bersekolah individu diatas 6 tahun terhadap jumlah penduduk diatas 6 tahun		
		9. Angka Partisipasi Kasar (APK)	Jumlah siswa tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu X 100%		
		10. Angka Partisipasi Murni (APM)	Jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI IKU	PROGRAM/KEG.	OPD TERKAIT
			pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan X100%		
5.	**Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau**	11. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Jumlah umur penduduk yang meninggal periode tertentuterhadapjumlah penduduk yang meninggal periode tertentu x 100%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		12. Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	Jumlah Balita Gizi Buruk yang tertangani periode tertentu Terhadap jumlah Balita yang lahir periode tertentu x 100%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
6.	**Meningkatnya Pemeliharaan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan**	13. Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Panjang jalan kondisi baik terhadap panjang jalan Kab.Luwu x 100%	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	DINAS PUPR
		14. Jumlah Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun Periode tertentu di Kab. Luwu	Program pembangunan Jalan dan Jembatan	
		15. Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	Jumlah Jaringan Irigasi kondisi baik terhadap jumlah jaringan irigasi di Kab. Luwu x 100%	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan Pengairan lainnya	
		16. Persentase Traffic Light	Jumlah Traffic Light yang berfungsi baik	Program peningkatan	DINAS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI IKU	PROGRAM/KEG.	OPD TERKAIT
		yang berfungsi baik	terhadap jumlah traffic light di Kab.Luwu	dan pengawasan lalu lintas	PERHUBUNGAN
7.	**Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas**	17. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Jumlah RT pengguna air bersih terhadap jumlah RT periode tertentu di Kab. luwu x 100%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		18. Persentase RT bersanitasi	Jumlah RT yang bersanitasi terhadap jumlah RT di Kab.Luwu x 100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		19. Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA	Volume sampah yang tertangani sampai TPA terhadap kapasitas TPA x 100%		
8.	**Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian**	20. Jumlah Produktivitas padi per hektar	Produksi padi periode tertentu di Kab.Luwu	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)	DINAS PERTANIAN
		21. Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB periode tertentu di Kab. Luwu x 100%	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI IKU	PROGRAM/KEG.	OPD TERKAIT
9.	**Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri**	22. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Investor di Kabupaten Luwu	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	DINAS PMPTSP
		23. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Jumlah PERDA yang mendukung iklim usaha	Program Pengendalian dan Pengawasan Perizinan	
10.	**Meningkatnya Jumlah danKualitas Wirausahawan**	24. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil periode tertentu di Kabupaten Luwu	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI,UKM DAN PERINDUSTRIAN
		25. Persentase Koperasi Aktif	Jumlah koperasi yang aktif periode tertentu terhadap jumlah koperasi di Kab. Luwu periode tertentu x 100%	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	
11.	**Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan**	26. ProduksiPerikanan (Tangkap + Budidaya)	Jumlah Produksi Perikanan periode tertentu di Kab. Luwu	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN
		27. Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah Bina kelompok nelayan periode tertentu di Kab.Luwu	Program Pemberdayaan Nelayan dan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI IKU	PROGRAM/KEG.	OPD TERKAIT
				Pembudidaya Ikan	
12.	**Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana**	28. Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persentase kesesuaian Lahan sesuai RTRW terhadap luas wilayah Kab. Luwu x100%	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.	**Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum**	29. Persentase Kepatuhan terhadap Perda	Jumlah Penegakan PERDA periode tertentu terhadap Jumlah PERDA seluruhnya periode tertentu di Kab. Luwu x100	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	DINAS SATPOL PP
		30. Cakupan patroli petugas satpol PP	Jumlah patroli petugas satpol PP periode tertentu.	Program Satuan Tugas (Satgas) Ketertiban Umum dan Ketentraman,	

F. Dukungan Program Terhadap Sasaran Tahun 2019 Periode 2014-2019

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius"		
Misi I : Meningkatkan profesionalisme Aparatur		
TUJUAN	**SASARAN**	**DUKUNGAN PROGRAM**
Mewujudkan Pelayanan publik yang prima	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	2 Program dan 2 Kegiatan
Meningkatkan kualitas Birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif	2 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik.	1 Program dan 1 Kegiatan
	3 Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur	2 Program dan 2 Kegiatan
Misi II : Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan		
TUJUAN	**SASARAN**	**DUKUNGAN PROGRAM**
Mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.	4 Terwujudnya peningkatan kualitas Pendidikan	1 Program dan 30 Kegiatan
	5 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	2 Program dan 11 Kegiatan
Misi III : Membangun desa dan menata kota		
TUJUAN	**SASARAN**	**DUKUNGAN PROGRAM**
Meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar	6 Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan	4 Program dan 24 Kegiatan

Misi IV : Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah		
TUJUAN	**SASARAN**	**DUKUNGAN PROGRAM**
Mewujudkan ketersediaan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata serta mampu mendukung pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya	7 Terwujudnya sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas	2 Program dan 6 Kegiatan
Misi V : Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah		
TUJUAN	**SASARAN**	**DUKUNGAN PROGRAM**
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah	8 Meningkatnya daya saing usaha pertanian	2 Program dan 7 Kegiatan
	9 Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	2 Program dan 6 Kegiatan
	10 Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan.	3 Program dan 7 Kegiatan
	11 Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan	2 Program dan 11 Kegiatan

Misi VI : Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan		
TUJUAN	**SASARAN**	**DUKUNGAN PROGRAM**
Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan	12 Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana	2 Program dan 5 Kegiatan
Misi VII : Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat		
TUJUAN	**SASARAN**	**DUKUNGAN PROGRAM**
Meningkatkan stabilitas di daerah	13 Meningkatnya stabilitas Keamanan kesadaran politik dan hukum	2 Program dan 3 Kegiatan

G. Visi Misi Periode 2019-2024

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019–2024 adalah:

> "Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri Dalam Nuansa Religi"

Rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 tersebut di atas, mengandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yakni:

- ✓ Maju: Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.
- ✓ Sejahtera: Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- ✓ Mandiri: Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
- ✓ Religi: Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilainilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat

yang aman, tenteram dan nyaman.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan dating, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat.
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.
5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
6. Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius.
7. Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik.
10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.

H. Tujuan dan Sasaran Periode 2019-2024

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan

pembangunan daerah atau tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

   Tata kelola pemerintahan yang akan diwujudkan adalah orientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya keberpihakan pada masyarakat yang lemah, memperteguh keharmonisan, kepemimpinan dan martabat manusia. Selain itu juga ditekankan adanya partisipasi, keadilan, persamaan hak, transparansi, supremasi hukum dan akuntabilitas, didukung dengan sumber daya aparatur yang profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Dibidang keuangan, diupayakan untuk terus mengembangkan pengelolaan keuangan daerah sehingga semakin mandiri dan mampu mengembangkan potensi daerah.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

   Untuk menyiapkan generasi emas, pendidikan menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua (education for all) menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Bukan sekadar pemerataan, tetapi juga peningkatan kualitas. Upaya yang dilakukan antara lain gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Di samping itu perluasan akses ke perguruan tinggi juga diupayakan dengan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, tetapi berkemampuan akademik. Selain pendidikan, aspek kesehatan juga perlu mendapat prioritas melalui peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan pusat kesehatan masyarakat pada tingkat desa, menyeimbangkan ketersediaan tenaga medis, meningkatkan kualifikasi tenaga medis, hingga mengefisiensikan pelayanan kesehatan.

3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan

   Infrastruktur merupakan aset (fisik dan non fisik) yang dirancang dalam sistem agar mampu melayani masyarakat. Mengacu pada manfaat infrastruktur bagi masyarakat tersebut, karakteristik dari peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur diprioritaskan untuk yang menghasilkan masukan/input bagi masyarakat (sarana air bersih, jaringan irigasi),

mengambil keluaran/output dari masyarakat (saluran drainase, tempat pembuangan sampah, sanitasi), dan yang dapat memberikan input dan mengambil output dari masyarakat (jaringan komunikasi, jalan raya)

4. Meningkatnya perekonomian daerah

   Pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat, meskipun tidak berarti harus mengalami kenaikan terus-menerus (misalnya dalam keadaan bencana)

5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat

   Kemandirian pangan dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan dipengaruhi oleh hasil produksi dan selanjutnya kemandirian pangan juga merupakan penopang/ukuran kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religious

   Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antarkelompok atau antarindividu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Toleransi merupakan salah satu ciri kehidupan yang religious.

7. Meningkatkan kemandirian Desa

   Setidaknya terdapat tiga dimensi untuk mengukur kemandirian desa. Pertama, dimensi kelembagaan pemerintah desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya. Ketergantungan kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya harus semakin kecil. Kedua, dimensi kelembagaan ekonomi masyarakat desa. Pada dimensi ini akan diketahui bagaimana tingkat kemampuan kelembagaan ekonomi masyarakat dalam upaya memajukan kondisi perekonomian. Semakin berjalan fungsi-fungsi kelembagaan ekonomi dalam menjawab semua kebutuhan material masyarakat, kelembagaan ekonomi itu semakin mandiri. Ketiga, kelembagaan sosial masyarakat. Pada dimensi ini akan tergambar dengan jelas bagaimana fungsi-fungsi kelembagaan sosial ini berjalan. Berbeda dengan dua dimensi lainnya yang cenderung material, dimensi ketiga ini cenderung abstrak. Bagaimana nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai universal dianut dan dijalankan oleh masyarakat dalam kelembagaan sosial akan sangat menentukan bagaimana keberhasilan kelembagaan sosial ini berperan di masyarakat.

8. Meningkatkan nilai investasi

   Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Ada banyak hal yang terlibat dalam aktivitas ini, dan beberapa di antaranya adalah jumlah dana dan tujuan dari investasi itu sendiri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan investasi di suatu daerah adalah situasi yang kondusif, infrastruktur, dan jaminan berinvestasi.

9. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum

   Menanamkan kesadaran hukum pada warga masyarakat wajib dilakukan semua pihak agar tertib hukum dapat berjalan lancar. Hukum adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur sebuah lembaga atau sebuah kelompok masyarakat tertentu. Hukum muncul untuk mengatur norma dan kehidupan masyarakatnya agar tercipta keharmonisan hidup. Hukum mengatur semua regulasi tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Hukum membuat suatu keadaan, baik poitik, sosial, maupun ekonomi dan beberapa bidang yang lain menjadi lebih tertata dan lebih baik. Hukum sejatinya tak akan pernah bisa terjadi bila tidak ada kesadaran untuk mentaatinya. Terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan agar kesadaran hukum bisa tumbuh dan berlaku sebagaimana mestinya di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pengetahuan yang luas tentang apa itu hukum, pemahaman akan hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum terhadap orang lain, serta penerimaan masyarakat terhadap hukum.

10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

    Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya konkrit untuk menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Sebagai contoh, untuk menghindari bencana atau mengurangi resiko dan kerugian khususnya bencana banjir, diperlukan adanya pemahaman tentang pengelolaan sungai yang baik dengan kerja sama semua pihak.

Tabel 2.6 Rumusan Tujuan, Indikator serta Target Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	T1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	Baik
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,37	72,51
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	T3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Rendah	Tinggi
4	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	T4. Meningkatnya perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,21	7,85
5	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	T5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	78	93
6	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	4	2,34
7	Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	T7. Meningkatkan kemandirian Desa	Persentase desa berstatus mandiri	0	10,6
8	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	T8. Meningkatkan nilai investasi	Nilai investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	16,69	18,88
9	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	T9. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum	Cakupan penegakan dan perlindungan hukum (%)	50	100
10	Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Sedang	Tinggi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Luwu dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan diatas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah

maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
   - S1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP.
   - S1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, dengan indikator Opini Laporan Keuangan.
   - S1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
   - S2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, dengan indikator Indeks Pendidikan.
   - S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator Indeks Kesehatan.
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan
   - S3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah, dengan indikator Persentasi Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap.
   - S3.2. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar, dengan indikator Persentase penduduk berakses air minum dan Rasio jaringan irigasi.
   - S3.3. Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman, dengan indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
4. Meningkatnya perekonomian daerah
   - S4.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, dengan indikator PDRB Perkapita dan Indeks Gini.
   - S4.2. Mengembangkan destinasi wisata, dengan indikator Jumlah obyek wisata yang dikembangkan.
   - S4.3. Menurunnya jumlah pengangguran, dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang
   - S5.1. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis, dengan indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian.
6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religious
   - S6.1. Meningkatnya upaya penyebarluasanan ajaran agama dengan indikator Jumlah kader mubaligh muda (orang) dan Presentase kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan.
7. Meningkatkan kemandirian Desa
   - S7.1 Berkembangnya Perekonomian Desa, dengan indikator Jumlah BUMDes berprestasi di tingkat nasional.
8. Meningkatkan nilai investasi
   - S8.1. Meningkatnya realisasi investasi, dengan indikator Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi dan Persentase wirausaha muda
9. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum
   - S9.1. Meningkatkan produk hukum daerah, dengan indikator Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)
   - S9.2. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial, dengan indikator Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
   - S9.3. Meningkatkan pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender.
10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
    - S10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH.
    - S10.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana, dengan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Tabel 2.7 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	T1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	S1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	CC	A
			S1.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
			S1.3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	T2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	S2.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	63,19	67,05
			S2.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,31	76,9
3	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	T3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	S3.1. Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	21,84	34,95
			S3.2. Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase penduduk berakses air minum	82,04	92,82
				Rasio jaringan irigasi	59,94	80
			S3.3. Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	75,45	81
4	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	T4. Meningkatnya perekonomian daerah	S4.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita (Juta Rp.)	36,6	41,98
				Indeks Gini	0,362	0,32
			S4.2. Mengembangkan destinasi wisata daerah	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	0	5
			S4.3. Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,47	3,94
5	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	T5. Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang	S5.1. Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	7,04	7,6

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		kesejahteraan masyarakat				
6	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	T6. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	S6.1. Meningkatnya upaya penyebarluasanan ajaran agama	Jumlah kader mubaligh muda (orang)	0	200
				Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	44,48	20
7	Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	T7. Meningkatkan kemandirian Desa	S7.1. Berkembangnya Perekonomian Desa	Berprestasi (Maju dan Mandiri)	0	11
8	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	T8. Meningkatkan nilai investasi	S8.1. Meningkatnya realisasi investasi	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	13	14
				Persentase wirausaha muda	*0,5*	3
9	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	T9. Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum	S9.1. Meningkatkan produk hukum daerah	Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	n.a	85
			S9.2. Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	100
			S9.3. Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	61,61	72,95
10	Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	T10. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	S10.1. Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	39,22	100
			S10.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Na	30

I. Strategi dan Arah Kebijakan Periode 2019-2024

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Inovatif, dan Responsif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatanan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan.
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat		
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas layanan kesehatan
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan		
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas infrastruktur wilayah	Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas wilayah
	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman
	Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	
Misi 4 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;		
Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Penanggulangan kemiskinan
	Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja
Misi 5 : Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis		
Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian
Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius		
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Menurunnya kasus menerima suap, penipuan dan penggelapan	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya
Misi 7 : Optimaslisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		
Meningkatkan Kemandirian Desa	Berkembangnya Perekonoman Desa	Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa
Misi 8 : Meningkatkan Investasi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan		
Meningkatkan Nilai Investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif
Misi 9 : Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik		
Meningkatnya produk hukum daerah	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum	Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah
	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak

Tujuan	Sasaran	Strategi
	anak	
Misi 10 : Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah maupun tahunan daerah. Adapun penjelasan rumusan strategi di atas adalah sebagai berikut:

1. **Strategi 1. Peningkatanan kualitas tata kelola dan tata laksana pemerintahan.**

   Peningkatan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan atau reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk menata, memperbaiki dan mengembangkan pemerintahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan reformasi birokrasi berarti pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan agar berkinerja lebih optimal. Reformasi birokrasi dilakukan pada seluruh aspek pemerintahan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan paradigma aparatur. Hal ini akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian dan pengelolaan aset daerah secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.

2. **Strategi 2. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan**

   Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Kabupaten Luwu. Pembangunan pendidikan dan kesehatan sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas

hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan mempunyai makna yang luas, tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga harus dengan mutu yang sama bagi setiap anak bangsa, agar setiap anak memperoleh pendidikan dan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

3. Strategi 3. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang amat penting untuk segera diwujudkan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari aspek teknis medis yang berhubungan langsung antara pelayanan medis dan pasien, atau mutu kesehatan dalam sudut pandang sosial dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk manajemen administrasi, keuangan, peralatan dan tenaga kesehatan lainnya. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelengaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu melalui pembangunan kesehatan.

Terkait dengan upaya pembangunan kesehatan tersebut, maka Pemerintah wajib meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Selain itu, kepada masyarakat juga terus diberikan pengetahuan tentang pentingnya hidup sehat.

4. Strategi 4. Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas wilayah

Pembangunan daerah terpencil dan perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pengelolaan daerah perbatasan menghendaki adanya perhatian yang lebih fokus agar terjadi peningkatan kualitas pembangunan dan kualitas penduduk di wilayah tersebut. Pembangunan akses ke kawasan terisolir seperti daerah tertinggal dan perbatasan diharapkan mampu mengurangi

kesenjangan/ketimpangan pembangunan. Ketimpangan ini akhirnya juga menyisakan banyak masalah pembangunan yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi “bom” yang meruntuhkan sendi-sendi pembangunan negara. Konsentrasi pembangunan di perkotaan akan memunculkan komplikasi pada masalah lingkungan, ketersediaan pangan, kemiskinan, dan berbagai masalah politik dan sosial lainnya.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan sebagai bagian dari transportasi mempunyai peranan untuk sarana pendukung kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan. Pembangunan daerah terpencil dan perbatasan memerlukan kerangka penanganan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor pembangunan, koordinasi, serta kerja sama yang efektif mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota, yang dijabarkan melalui kebijakan makro yang pelaksanaannya bersifat strategis dan operasional dengan mempertimbangkan aspek waktu yang ketat. Dalam pencapaiannya, pembangunan daerah terpencil dan perbatasan perlu dilandasi semangat, konsistensi, serta etika/moral yang baik dari pihak penyelenggara baik dari pusat maupun di daerah kabupaten/kota, demi mengabdi kepada bangsa dan negara, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi di antaranya, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Dalam konteks ini, pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Dalam perkembangannya, pembangunan infrasturktur yang terjadi tidaklah selalu harus sama jumlahnya di tiap daerah, dengan infrastruktur yang dianggap berkeadilan adalah infrastruktur yang mampu mencukupi kebutuhan hidup manusia, sesuai dengan kebutuhan.

5. Strategi 5. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Rumah mempunyai fungsi yang multidimensi. Selain fungsi fisik, rumah juga mempunyai fungsi sosial dan ekonomi yang dapat terlihat dari pemanfaatannya. Agar dapat berfungsi secara layak, rumah harus dilengkapi infrastruktur dasar seperti taman, ruang terbuka, jaringan jalan dan sistem transportasi, jaringan listrik dan air minum. Penyediaan tersebut harus sesuai dengan tata ruang yang ada sehingga dapat mendukung berbagai kegiatan sosial dan ekonomi baik dalam skala lingkungan perumahan maupun kota.

Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan komponen, jasa konstruksi dan rancang bangun, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung.

6. Strategi 6. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satu indikatornya adalah pendapatan riel per kapita. Pendapatan per kapita dapat diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi, yaitu yang dikeluarkan untuk pembelian barang

konsumtif dan jasa-jasa yang dibutuhkan rumah tangga bagi pemenuhan kebutuhan. Rendahnya pertumbuhan pendapatan per kapita berarti mencerminkan rendahnya pertumbuhan ekonomi.

Usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, mengembangkan produk unggulan di setiap wilayah, menggalakkan program kerja dan transfer pemerintah kepada golongan-golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

Upaya pemerintah yang tidak kalah penting adalah pengembangan koperasi dan UMKM yang merupakan landasan utama perekonomian negara. Melalui pengelolaan koperasi dan UMKM secara profesional dan bantuan pemerintah terhadap akses permodalan, pemerataan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan.

7. Strategi 7. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung perekonomian yang bertujuan untuk memajukan perekonomian daerah. Sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Luwu berpendidikan rendah dengan pengalaman yang kurang memadai (minim), sehingga belum memiliki keterampilan dan keahlian yang baik serta maksimal untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran pemuda dan masyarakat untuk lebih meningkatkan keterampilan, juga keahlian diri, supaya daya saing tenaga kerja dan iklim wirausaha Kabupaten Luwu lebih berkualitas agar dapat menyerap tenaga kerja profesional dengan hasil *income* yang cukup untuk kebutuhan kehidupan layak.

Di samping itu, dalam rangka mengantisipasi perkembangan pencari kerja yang terus meningkat di setiap tahunnya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Sehingga lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal mampu menampung tenaga kerja di seluruh wilayah.

8. Strategi 8. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian

Peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Luwu sebagai bagian dari bangsa Indonesia merupakan hal yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan

negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberdayaan dimaknai sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada menjadi lebih baik, dengan menggunakan metode, proses, program dan upaya yang digerakkan pihak yang berwenang (memiliki otoritas) sesuai dengan undang-undang demi mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih dari kondisi sebelumnya.

Bidang pertanian merupakan bidang pekerjaan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Luwu karena keadaan wilayah yang merupakan daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar. Fasilitasi di bidang permodalan, peningkatan keahlian, dan akses pasar produk pertanian perlu ditingkatkan.

Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian merupakan bagian dari penanggulangan kemiskinan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dan keberdayaan keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan umum berupa sarana dan prasarana sosial ekonomi, pendidikaan, kesehatan, perumahan, dan penyediaan sumber daya produksi. Perberdayaan masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin dan berpotensi menjadi miskin.

9. Strategi 9. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya

Agama dan budaya merupakan obyek dan indikator keberhasilan pembangunan daerah. Setiap orang Indonesia memiliki agama dan kepercayaan yang diyakini, serta memahmi budaya leluhur yang dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan. Namun demikian, pemahaman terhadap agama dan budaya masih belum menjadi perilaku yang mewarnai setiap gerak kehidupan, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam bermasyarakat.

Pembangunan agama dan budaya merupakan upaya mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama.Selain itu, pembangunan agama

juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang mendukung peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat.

Kehidupan beragama pada sebagian masyarakat baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum sepenuhnya bersifat substansial. Hal ini tercermin antara lain pada gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, suap dan perjudian. Berbagai perilaku masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan etika keagamaan itu jelas menggambarkan kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya.

Budaya dan seni daerah merupakan kekayaan bangsa yang harus diperhatikan secara serius dan seksama, terutama dalam memasuki era otonomi daerah. Hal ini dikarenakan budaya daerah dapat memberi andil yang sangat besar dalam pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa, terlebih untuk Kabupaten Luwu yang memiliki sejarah yang gemilang dimasa lalu. Pada masa sekarang ini seni budaya daerah sudah mulai terkikis dan tergerus oleh budaya luar.

Memasuki era otonomi daerah maka budaya daerah hendaknya menjadi sumber bagi pembentukan jati diri bangsa dan proses regenerasi bangsa. Maka diharapkan untuk dapat kembali kepada akar budaya kita sendiri. Apabila tidak maka diprediksi sangat mungkin kita tidak akan memiliki jati diri yang benar–benar tumbuh.

Budaya daerah diharapkan menjadi fundamen utama dalam pembentukan jati diri bangsa karena jati diri merupakan karakteristik jiwa bangsa yang bersumber dari akar budaya daerah masing-masing. Maka dengan sendirinya akan memberi jati diri pada setiap generasi anak Bangsa Indonesia di Kabupaten Luwu.

10. Strategi 10. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat agar makmur dan berkeadilan. Kebijakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemerintah daerah di segala bidang terus diupayakan dan dimaksimalkan dalam rangka melaksanakan

pembangunan. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa adalah pemberdayaan pemilikan faktor-faktor produksi, pemberdayaan penguasaan distribusi dan pemasaran, pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan pada beberapa aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, mapun aspek kebijakannya.

Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal dan problem spesifik, maka strategi untuk meningkatkan keberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa juga harus spesifik dan menurut kondisi lokal. Pemahaman ini harus diketahui oleh aparatur pemerintahan desa agar mereka mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif dalam memberdayakan masyarakat desa.

11. Strategi 11. Peningkatan iklim investasi yang kondusif

Iklim investasi di Kabupaten Luwu masih belum kondusif mengingat infrastruktur perhubungan belum optimal dalam pengembangannya, khususnya ke daerah-daerah yang memiliki potensi unggulan. Hal ini menjadi ganjalan bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu. Masih rendahnya kontribusi industri pengolahan menjadi salah satu parameter minimnya investasi yang digelontorkan investor.

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan ekonomi karena mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Semakin banyak dan tinggi nilai investasi, semakin besar pula dampak dan manfaat seperti menyerap tenaga kerja, optimalisasi sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat di daerah. Selama lima tahun ke depan, penguatan investasi akan ditempuh oleh pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) melalui dua pilar kebijakan yaitu peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada pilar pertama, arah kebijakan yang ditempuh adalah menciptakan iklim

investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Adapun pada pilar kedua, arah kebijakan yang ditempuh adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.

12. **Strategi 12. Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah**

    Penyelenggaraan pembangunan daerah membutuhkan berbagai regulasi untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Regulasi secara umum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Regulasi dibuat melalui proses tertentu dimana suatu kelompok masyarakat atau lembaga sepakat untuk mengikuti atau terikat pada aturan tertentu yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama.

    Regulasi merupakan kebutuhan pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pelayanan, sebagai pengatur, dan juga sebagai pengelola usaha untuk menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi untuk menetapkan regulasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat serta penegakannya merupakan hal yang tepat.

13. **Penerapan kebijakan berbasis gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak**

    Perempuan dan anak perempuan harus dapat menikmati akses yang sama terhadap pendidikan kesehatan yang berkualitas, sumber daya ekonomi dan partisipasi politik. Serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dan anak laki-laki untuk kesempatan kerja, dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pada setiap level. Segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap

perempuan dan anak perempuan harus dihilangkan, melalui keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki. Pengarusutamaan yang sistematis dari perspektif gender di dalam implementasi agenda SDGs sangat penting.

Apabila tidak ada mainstreaming gender, khususnya perempuan mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang memadai, akan berpengaruh pada kualitas bangsa di masa depan. Perempuan harus mendapatkan layanan yang baik mulai dari menstruasi, hamil, melahirkan, sampai nifas. Apabila pemerintah tidak memainstream-kan kesehatan reproduksi perempuan, kualitas generasi mendatang yang lahir dari perempuan akan terpengaruh.

Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa meningkatnya taraf hidup perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang teramat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Oleh sebab itu, salah satu strategi yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah meningkatkan taraf hidup dan partisipasi perempuan dalam pembangunan sekaligus memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

14. Strategi 13. Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup

Perubahan ekosistem lingkungan yang paling utama disebabkan oleh perilaku masyarakat yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ekosistem lingkungan tercemar dan rusak maka akan berdampak buruk bagi kelanjutan dari keberadaan sumber daya alam yang akhirnya dapat menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk memelihara kualitas lingkungan dengan cara mengelola sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan usaha secara sadar dengan cara menggali sumber daya alam, tetapi tidak merusak sumber daya alam lainnya sehingga dalam penggunaannya harus memerhatikan pemeliharaan dan perbaikan kualitas dari sumber daya alam tersebut. Pengelolaan sumber daya alam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, namun masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

15. Strategi 14. Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana

Kabupaten Luwu tergolong wilayah yang rawan bencana, seperti halnya wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, strategi penanggulangan bencana perlu menjadi salah satu kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah membutuhkan langkah-langkah tertentu dalam melakukan penanggulangan bencana. Langkah pertama adalah membuat perencanaan. Dalam menyusun perencanaan diperlukan informasi akar permasalahan kebencanaan yang dihadapi oleh daerah yakni risiko bencana. Guna mengetahui risiko tersebut, maka dilakukan kajian risiko bencana.

Setelah mengetahui risiko bencana, maka langkah selanjutnya dalam penanggulangan bencana adalah melakukan pengelolaan risiko bencana tersebut. Kegiatan ini intinya adalah menentukan langkah, program, dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi risiko bencana. Kemudian langkah terakhir adalah membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk respons yang lebih baik. Setelah mengetahui risiko bencana, menyusun upaya pengelolaan risiko bencana, dan melakukan investasi, maka berbagai pengetahuan tersebut perlu menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Cara yang ditempuh adalah dengan melakukan geladi atau latihan kesiapsiagaan.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang tertuang didalam RPJMD Periode 2019-2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.9 Matriks Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2019-2024

Strategi	Arah Kebijakan
S1. Peningkatanan kualitas tatakelola dan tatalaksana pemerintahan	1. Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
	2. Penerapan *merit system* dalam pembinaan dan pengembangan pegawai
	3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
	4. Pembangunan sistem informasi pemerintah daerah yang terintegrasi dan basis data pembangunan daerah yang terpusat
S2. Pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan	5. Meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal
	6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
S3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan	7. Pemerataan kualitas layanan kesehatan
S4. Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas wilayah	8. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan
S5. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan lingkungan kawasan permukiman	9. Pembangunan dan peningkatan jaringan air bersih dan irigasi
	10. Penataan lingkungan kawasan permukiman
S6. Penanggulangan kemiskinan	11. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi
	12. Peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan
	13. Pengembangan pariwisata daerah
S7. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja	14. Meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan tenaga kerja
	15. Peningkatan layanan jasa konstruksi
S8. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan	16. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian/ perkebunan
	17. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani
S9. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya	18. Pembentukan karakter dan keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
	19. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya Luwu
S10. Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa	20. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa
	21. Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa
S11. Peningkatan iklim investasi yang kondusif	22. Mengurangi risiko investasi di Kabupaten Luwu
	23. Meningkatkan promosi potensi investasi daerah
S12. Optimalisasi pengundangan dan penegakan produk hukum daerah	24. Penyusunan dan penetapan peraturan perundangan daerah
	25. Sosialisasi dan penegakan produk hukum daerah
S13. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	26. Peningkatan keberdayaan perempuan
	27. Peningkatan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
S14. Peningkatan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup	28. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDA
S15. Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana	29. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanggulangan bencana
	30. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manajemen penanggulangan bencana

J. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Periode 2019-2024

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu pada Bulan Agustus, maka Indikator Kinerja Utama dokumen RPJMD menjadi tolak ukur yang harus dicapai oleh Kepala Daerah sebagai kondisi awal tahun perencanaan berkenaan.

Tabel 2.10

Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2019 Sesuai RPJMD Periode 2019-2020

Tujuan	Sasran Strategis	No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2019
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Kat	CC
		2	Kategori SAKIP Kabupaten	Kat	CC
		3	Opini Pemeriksa Laporan Keuangan	Kat	WTP
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kat	Sedang
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	**5**	**Indeks Pembangunan Manusia**	Skor	69,37
		6	Indeks Pendidikan	Skor	63,19
		7	Indeks Kesehatan	Skor	76,31
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	**8**	**Indeks Layanan Infrastruktur**	Kat	Cukup
		9	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	21,84
		10	Persentase penduduk berakses air minum	%	82,04
		11	Rasio jaringan irigasi	%	59,94
		12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	75,45
Meningkatnya perekonomian daerah	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	**13**	**Pertumbuhan Ekonomi**	Angka	7,21
		14	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Angka	36,60
		15	Indeks Gini	Angka	0,362
		16	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	Objek	0
		17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,47
Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	**18**	**Indeks Ketahanan Pangan**	Angka	87,00
		19	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	5,04
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam	**20**	**Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk**	Angka	4,00
		21	Jumlah Kader Muballigh	Orang	0,00

Tujuan	Sasran Strategis	No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2019
	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	22	Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	%	44,48
Meningkatkan kemandirian Desa	Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**23**	**Persentase Desa Berstatus Mandiri**	%	0
		24	Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	Unit	0,00
Meningkatkan nilai investasi	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	**25**	**Nilai investasi PMA dan PMDN**	Angka	16,69
		26	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi	Perusahaan	13,00
		27	Persentase Wirausaha Muda	%	0,50
Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	**28**	**Cakupan Penegakan dan Perlindungan Hukum**	%	80,00
		29	**Cakupan ketersediaan produk hukum daerah**	%	50,00
		30	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00
		31	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	61,61
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	**32**	**Indeks kualitas lingkungan hidup**	Kat	Sedang
		33	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	%	39,22
		34	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Angka	30,00

K. Indikator Kinerja Utama Periode 2019-2024

Sebagaimana penetapan Peraturan Daerah tentanga RPJMD Kabupaten Luwu Periode 2019-2024, Indikator Kinerja Utama pada tahuna 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Urusan Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi / Sumber	Urusan Perangkat Daerah
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi KEMENPAN RB	Sekretariat Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2. Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi KEMENPAN RB	Bappeda & Litbang
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	3. Opini Laporan Keuangan	Laporan Hasi Evaluasi Pertanggaungjawabn Keuangan Daerah	BPKD
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Survey Lembaga Survey	Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Langsung
5	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	5. Indeks Pembangunan Manusia	Hasil Perhitungan BPS Kabupaten	Bappeda & Litbang
6	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	6. Indeks Pendidikan	Hasil Perhitungan Dinas Pendidikan Kabupaten	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
7	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	7. Indeks Kesehatan	Hasil Perhitungan Dinas Kesehatan Kabupaten	Dinas Kesehatan
8	Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	8. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Hasil Perhitungan Dinas PUPR Kabupaten	Dinas PUPR
9	Meningkatkan aksebilitas dan konektifitas wilayah	9. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Hasil Perhitungan Dinas PUPR Kabupaten	Dinas PUPR
10	Meningkatkan kelayakan dan ketersediaan infrastruktur dasar	10. Persentase penduduk berakses air minum	Hasil Perhitungan Dinas PUPR Kabupaten	Dinas PUPR
		11. Rasio jaringan irigasi	Hasil Perhitungan Dinas PUPR Kabupaten	Dinas PUPR
11	Meningkatkan PSU lingkungan kawasan permukiman	12. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Hasil Perhitungan Dinas PUPR Kabupaten	Dinas PUPR
12	Meningkatnya perekonomian daerah	13. Pertumbuhan Ekonomi (%)	Hasil Perhitungan BPS Kabupaten	Bappeda & Litbang
13	Meningkatnya pendapatan masyarakat	14. PDRB Perkapita (Juta Rp.)	Hasil Perhitungan BPS Kabupaten	Bappeda & Litbang

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi / Sumber	Urusan Perangkat Daerah
		15. Indeks Gini	Hasil Perhitungan BPS Kabupaten	Bappeda & Litbang
14	Mengembangkan destinasi wisata daerah	16. Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	Hasil Perhitungan Dinas Pariwisata Kabupaten	Dinas Pariwisata
15	Menurunnya jumlah pengangguran	17. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Hasil Perhitungan BPS Kabupaten	Bappeda & Litbang
16	Meningkatkan hasil pangan dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	18. Indeks Ketahanan Pangan	Hasil Perhitungan Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
17	Meningkatnya perekonomian daerah berbasis agribisnis	19. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian (%)	Hasil Perhitungan Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
18	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	20. Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk	Hasil Perhitungan Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Bakesbangpol
19	Meningkatnya upaya penyebarluasanan ajaran agama	21. Jumlah kader mubaligh muda (orang)	Hasil Perhitungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		22. Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	Hasil Perhitungan Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Bakesbangpol
20	Meningkatkan kemandirian Desa	23. Persentase desa berstatus mandiri	Hasil Perhitungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
21	Berkembangnya Perekonomian Desa	24. Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	Hasil Perhitungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
22	Meningkatkan nilai investasi	25. Nilai investasi PMA dan PMDN (Miliar Rp)	Hasil Perhitungan Dinas Penanaman Modal & PTSP	Dinas Penanaman Modal & PTSP
23	Meningkatnya realisasi investasi	26. Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi (perusahaan)	Hasil Perhitungan Dinas Penanaman Modal & PTSP	Dinas Penanaman Modal & PTSP
		27. Persentase wirausaha muda	Hasil Perhitungan Dinas Pemuda & Olahraga	Dinas Pemuda & Olahraga
24	Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum	28. Cakupan penegakan dan perlindungan hukum (%)	Hasil Perhitungan Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi / Sumber	Urusan Perangkat Daerah
25	Meningkatkan produk hukum daerah	29. Cakupan ketersediaan produk hukum daerah (%)	Hasil Perhitungan Sekretariat Dewan	Sekretariat DPRD
26	Meningkatkan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah sosial	30. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Hasil Perhitungan Dinas Sosial	Dinas Sosial
27	Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	31. Indeks Pemberdayaan Gender	Hasil Perhitungan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
28	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	32. Indeks kualitas lingkungan hidup	Hasil Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
29	Meningkatkan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	33. Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	Hasil Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
30	Meningkatnya kualitas pengelolaan bencana	34. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Hasil Perhitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing–masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu 2014-2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu selama periode berkenaan berjalan.

Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan yang berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 sebagai fokus utama kepala daerah dalam membangun daerahnya. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi. Guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Luwu.

Demi mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan mengklasifikasikan kategori capaian, dimana interval dan kriteria realisasi kinerja merujuk pada skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun Rentang capaian terhadap kategori capaian disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

A. Capaian Kinerja Kabupaten Luwu Tahun 2019

Indikator Kinerja Sasaran yang akan dikinerjakan adalah indikator masing-masing sasaran untuk setiap misi yang ada dalam dokumen RPJMD. Indikator sasaran tersebut berupa *Outcome* dan penting yang juga sekaligus merupakan indikator kinerja utama perangkat daerah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran-sasaran turunan dari misi yang tertuang didalam dokumen RPJMD 2014 - 2019. Selain itu, mengingat tahun 2019 merupakan tahun transisi periode dokumen RPJMD, antara RPJMD Periode 2014-2019 dengan RPJMD Periode 2019-2019, maka turut disajikan capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Periode 2019-2024.

Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Luwu tahun 2019 secara ringkas disajikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Periode RPJMD2014-2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Predikat Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
2	Persentase Capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pegawai ASN	%	90	85	94,44	Sangat Tinggi
3	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	98	94	95,92	Sangat Tinggi
5	Predikat AKIP	Kategori	65	51,78	79,66	Tinggi
6	Persentase Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	%	70	68	97,14	Sangat Tinggi
7	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A)	%	81	77	95,06	Sangat Tinggi
8	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,3	8,15	98,19	Sangat Tinggi
9	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	100	95,16	95,16	Sangat Tinggi
10	Angka Partisipasi Murni (APM)					Sangat Tinggi
	- SD/Paket A	%	99,5	93,51	93,98	
	- SMP/Paket B	%	93	82,17	88,35	
11	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,8	70,19	91,39	Sangat Tinggi
12	Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	%	100	95	95	Sangat Tinggi
13	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	28,01	21,29	76,01	Tinggi
14	Jumlah Pembangunan Jembatan	Unit	35	32	91,43	Sangat Tinggi
15	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	%	45	40,26	89,47	Tinggi
16	Persentase *Traffic Light* yang berfungsi baik	%	100	60,00	60,00	Rendah
17	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	84	80,64	96,00	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2019			Kategori Capaian
			Target	Realisasi	Capaian	
18	Persentase RT bersanitasi	%	86,89	81,38	93,66	Sangat Tinggi
19	Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA	%	81	67,3	83,09	Tinggi
20	Jumlah Produktivitas padi per hektar	Ton/Ha	7,6	6,8	89,47	Tinggi
21	Kontribusi sector Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	55	52,38	95,24	Sangat Tinggi
22	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	14	13	92,86	Sangat Tinggi
23	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	9	4	44,44	Sangat Rendah
24	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	35.000	19.250	55,00	Rendah
25	Persentase Koperasi Aktif	%	15	11,03	73,53	Sedang
26	Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya)	Ton	700.000	644.357	92,05	Sangat Tinggi
27	Cakupan bina kelompok nelayan	Klmpk	70	72,2	103,14	Sangat Tinggi
28	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	95	86,5	91,05	Sangat Tinggi
29	Persentase Kepatuhan terhadap Perda	%	100	100	100	Sangat Tinggi
30	Cakupan patroli petugas satpol PP	kali	80	80	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 30 Indikator Kinerja Kabupuaten Luwu, pada tahun 2019 capaiannya secara umum sudah sangai baik, dimana terdapat 21 indikator atau 70,0% dengan kategori capaian “Sangat Tinggi”, 5 indikator atau 16,7% dengan kategori “Tinggi”, 1 indikator dengan kategori “Sedang”, 2 Indikator atau 6,7% berkategori “Rendah” dan hanya 1 indikator atau sama dengan 3,3% dengan kategori “Sangat Rendah”. Berdasarkan kategori capaiannya tersebut Kategori Capaian Kinerja IKU Kabupaten Luwu Tahun 2019 seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Diagram Capaian Kinerja IKU Tahun 2019

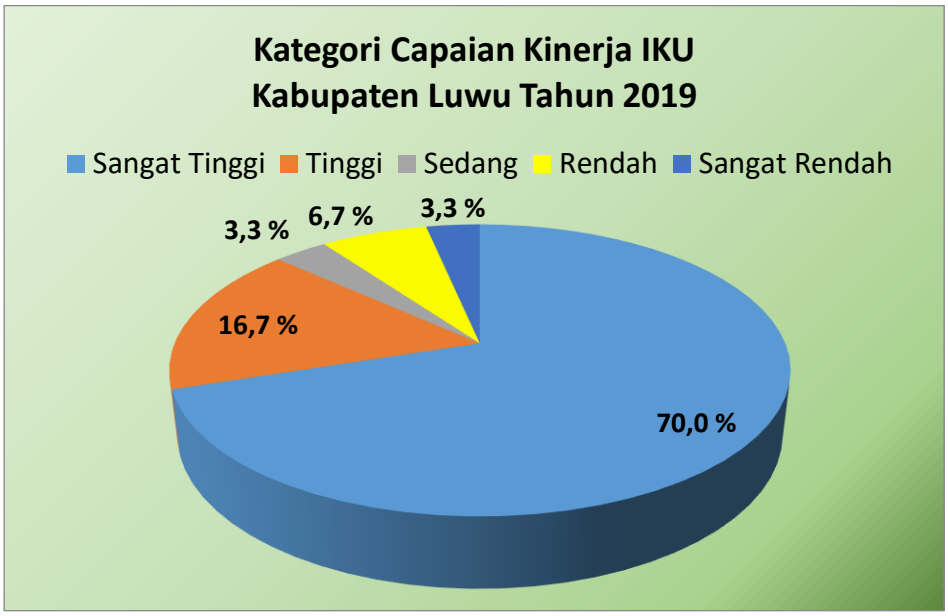

Indikator-indikator yang diukur merupakan turunan dari sasaran setiap misi kepala daerah yang termuat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Luwu 2014 – 2019. Adapun Pencapaian masing-masing indikator tersebut kemudian diuraikan berdasarkan sasaran dari tiap-tiap misi sehingga sekaligus menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah selama periode jabatannya. Sedangkan untuk capaian IKU dokumen RPJMD Periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Periode RPJMD 2019-2024

Tujuan	Sasran Strategis	No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Kategori Capaian
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel;	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Kat	CC	CC	100,00	Sangat Tinggi
		2	Kategori SAKIP Kabupaten	Kat	CC	CC	100,00	Sangat Tinggi
		3	Opini Pemeriksa Laporan Keuangan	Kat	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kat	Sedang	Sedang	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat	**5**	**Indeks Pembangunan Manusia**	Skor	69,37	70,39	101,47	Sangat Tinggi
		6	Indeks Pendidikan	Skor	63,19	63,19	100,00	Sangat Tinggi
		7	Indeks Kesehatan	Skor	76,31	76,31	100,00	Sangat Tinggi
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Berkelanjutan	**8**	**Indeks Layanan Infrastruktur**	Kat	Cukup	Cukup	100,00	Sangat Tinggi
		9	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	21,84	21,29	97,48	Sangat Tinggi
		10	Persentase penduduk berakses air minum	%	82,04	80,64	98,29	Sangat Tinggi
		11	Rasio jaringan irigasi	%	59,94	67,90	113,28	Sangat Tinggi
		12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	75,45	75,45	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya perekonomian daerah	Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	**13**	**Pertumbuhan Ekonomi**	Angka	7,21	6,26	86,82	Tinggi
		14	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Angka	36,60	26,87	73,42	Sedang
		15	Indeks Gini	Angka	0,362	0,352	97,24	Sangat Tinggi
		16	Jumlah obyek wisata unggulan yang dikembangkan	Objek	0	0	100,00	Sangat Tinggi
		17	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,47	4,66	95,92	Sangat Tinggi
Meningkatkan hasil pangan	Mewujudkan Ketahanan	**18**	**Indeks Ketahanan Pangan**	Angka	87,00	87,00	100,00	Sangat Tinggi

Tujuan	Sasran Strategis	No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019			Kategori Capaian
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat	Pangan dan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Berbasis Agribisnis	19	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	5,04	3,98	78,97	Tinggi
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan religius	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius	**20**	**Angka kriminalitas Per 10000 Penduduk**	Angka	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi
		21	Jumlah Kader Muballigh	Orang	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi
		22	Persentase kasus suap, penipuan dan penggelapan	%	44,48	44,48	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatkan kemandirian Desa	Optimaslisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	**23**	**Persentase Desa Berstatus Mandiri**	%	0	0,00	100,00	Sangat Tinggi
		24	Jumlah BUMDes berprestasi (Maju dan Mandiri)	Unit	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatkan nilai investasi	Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan Lingkungan	**25**	**Nilai investasi PMA dan PMDN**	Angka	16,69	16,69	100,00	Sangat Tinggi
		26	Jumlah PMA dan PMDN yang berinvestasi	Perusahaan	13,00	13,00	100,00	Sangat Tinggi
		27	Persentase Wirausaha Muda	%	0,50	0,50	100,00	Sangat Tinggi
Meningkatnya penegakan dan perlindungan hukum	Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong Partispasi Publik	**28**	**Cakupan Penegakan dan Perlindungan Hukum**	%	80,00	80,00	100,00	Sangat Tinggi
		29	**Cakupan ketersediaan produk hukum daerah**	%	50,00	50,00	100,00	Sangat Tinggi
		30	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		31	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	61,61	64,30	104,37	Sangat Tinggi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana	**32**	**Indeks kualitas lingkungan hidup**	Kat	Sedang	Sedang	100,00	Sangat Tinggi
		33	Persentase pembinaan dan pengawasan izin PPLH dan PUU LH	%	39,22	36,00	91,79	Sangat Tinggi
		34	Indeks Risiko Bencana Indonesia	Angka	30,00	30,00	100,00	Sangat Tinggi

Berikutnya capaian kinerja indikator utama Tahun 2019 periode RPJMD 2014-2019 dijabarkan masing masing berdasarkan misi dan sasaran masing masing.

1. Capaian Kinerja Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur

Dalam rangka mewujudkan misi pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 3 Sasaran yang terdiri dari 6 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1.1 Sasaran I : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas" pada misi "Meningkatkan Profesionalisme Aparatur" dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Sasaran I Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas	Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100
	Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN	%	90	85	94,44
Rata – rata capaian kinerja					**97,22**

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang mencapai target kinerja dan satu indikator yang tidak

mencapai target kinerja, sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 97,22%. Namun begitu kategori capaiannya “Sangat Tinggi” karena berada pada rentang capaian Lebih dari 91 % sampai dengan 100%.

Tabel 3.5

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran I tahun 2019 dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)			
		2016	2017	2018	2019
1.	Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	100	100	100
2.	Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN	88,75	93,75	94,44	94,44

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan tiga tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas ini mampu mempertahankan predikat WTP nya selama beberapa tahun. Indikator Predikat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dimana empat tahun berturut-turut yakni tahun 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019 mampu meraih predikat WTP. Selama beberapa tahun tersebut Kabupaten Luwu sanggup mengoptimalkan kinerjanya untuk tetap bertahan di predikat WTP. Begitupun halnya dengan indikator ke-2 yaitu Persentase capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN. Indikator ini mengalami peningkatan yang signifikan selama empat tahun berturut-turut yakni sebesar 88,75 % pada tahun 2016 kemudian sebesar 93,75% pada tahun 2017 dan sebesar 94,44% pada tahun 2018, serta 94,44% pada tahun 2019, Sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.2

Grafik capaian kinerja Sasaran 1 "Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas" beberapa tahun terakhir

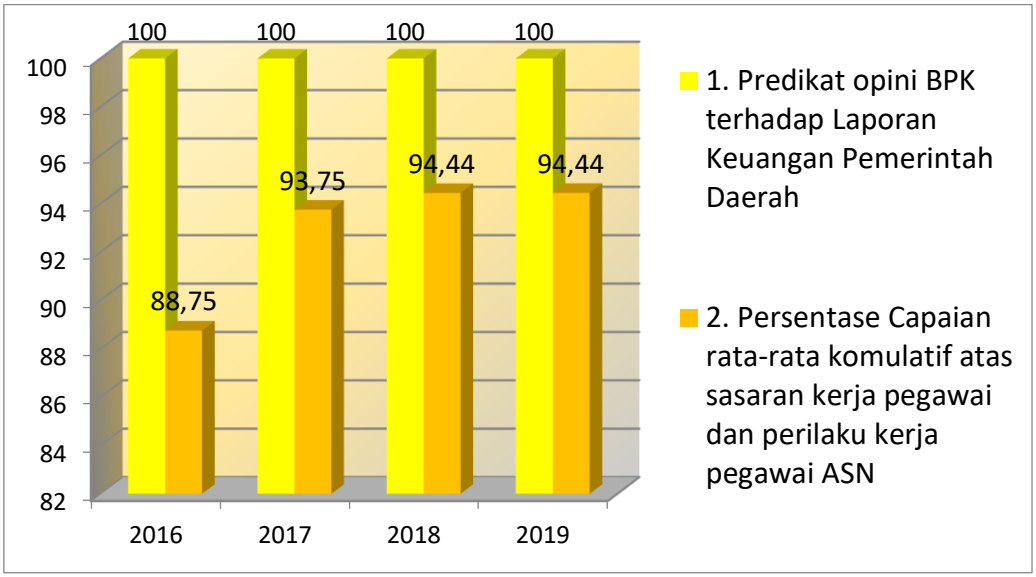

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu: 1) Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan 2) Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN. Indikator Predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 mampu diraih dengan opini WTP sesuai target WTP. Dimana Acuan untuk pemberian opini WTP selain kepatuhan terhadap perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, kesesuaian *SAP* dan *Internal Control*, juga disebabkan karena beberapa hal, yakni:

1. Adanya kepercayaan publik, transparansi, dan regulasi yang sehat dimana untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah;

2. Pemerintah mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan; dan
3. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Untuk mempertahankan indikator tersebut diatas maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah Upaya Peningkatan Komitmen dari setiap unsur pelaksana bahwa upaya perbaikan pengelolaan keuangan tidak hanya dengan semangat tapi juga dengan dukungan dana yang besar, sumber daya manusia yang profesional dan yang paling penting adalah itikad untuk melaksanakan perbaikan secara *kaffah*.

Indikator Persentase Capaian rata-rata komulatif atas sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai ASN tidak mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2019 dari tahun 2018, dimana capaian ini belum mampu mencapai hasil terbaik yang disebabkan oleh metode penilaian kinerja yang ada saat ini telah berorientasi pada hasil kinerja masing-masing pegawai, walaupun kenyataannya dilapangan, menunjukkan bahwa proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak kedalam proses formalitas saja yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan tentang sistem penilaian Sistem Kerja Pegawai (SKP) yang sesuai ketentuan mengingat metode ini baru dilaksanakan dua tahun belakangan.

Lebih dari itu sistem ini sejatinya sangat mendongkrak performa pegawai selain karena menerapkan asas transparansi, juga kesesuaian tupoksi sangat diperhatikan dalam praktik penilaiannya. Seperti halnya setiap peraturan, selalu ada plus-minusnya. Sehingga Untuk meningkatkan indikator tersebut diatas, maka Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil Ini diharapkan mampu dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan karier atau promosi dari seorang PNS, selain itu juga untuk menentukan training, standar penggajian, mutasi atau perpindahan pegawai, peningkatan produktivitas dan

tanggungjawab karyawan, peningkatan motivasi pegawai, menghindari pilih kasih dan terlebih lagi sangat bermanfaat dalam hal pengukuran keberhasilan kepemimpinan sesorang Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu sangat diharapkan dukungan dari semua personel Pegawai Negeri Sipil untuk membuat Sasaran Kerja Pegawai ini karena di dalamnya memuat semua kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai, serta kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintah yang berkualitas ini adalah sebanyak 2 program dan 2 kegiatan, yaitu: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 1 kegiatan, dan Program pembinaan dan pengembangan aparatur dengan 1 kegiatan.

1.2 Sasaran II: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Layanan Pemerintah serta Mewujudkan Perluasan Partisipasi Publik” pada misi “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	100	100	100
	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	%	98	94	95,92
Rata – rata capaian kinerja					**97,96**

Dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang terealisasi mencapai target kinerja dan satu indikator kinerja yang tidak mencapai target yang direncanakan, sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 97,96%, dimana kategori capaiannya “Sangat Tinggi” karena berada pada rentang capaian 91% sampai dengan 100%.

Tabel 3.7

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran II tahun 2019 dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	75	75	100	100
2.	Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk	95	100	100	95,92

Meninjau capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas dan

akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik ini mampu mempertahankan capaiannya selama beberapa tahun kebelakangan. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada tahun 2019 menyamai capaian pada tahun 2018, sedangkan pada Indikator Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk, pada tahun 2019 mengalami penurunan apabila dibadingkan dengan capaian pada tahun 2018 sebagaiamana yang dapat disajikan pada grafik berikut:

Gambar 3.3

Grafik capaian kinerja Sasaran 2 "Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik"

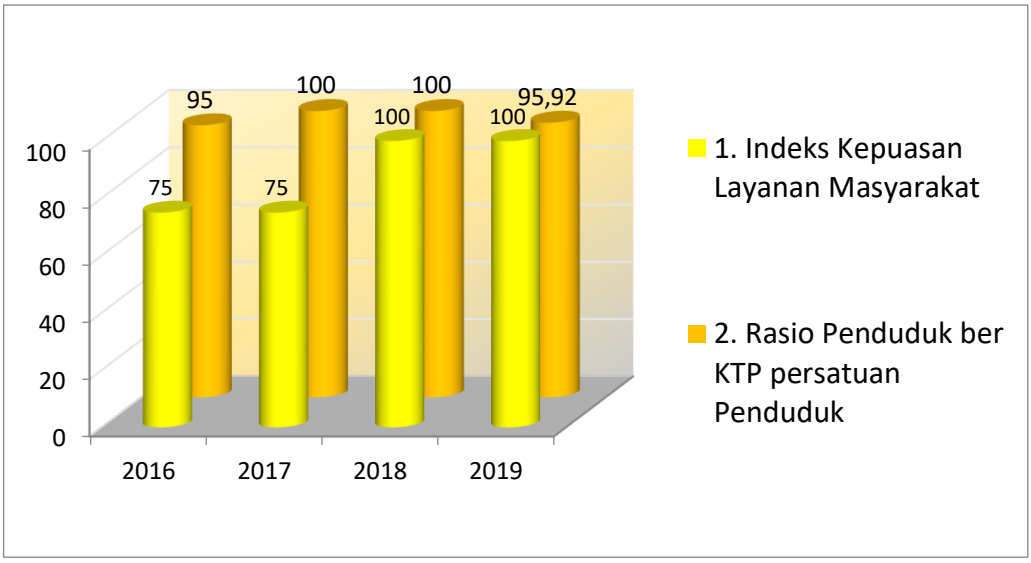

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat; 2) Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk.

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada tahun 2019 cenderung turun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yang dimana hal ini tentunya tidak terlepas dari banyak hal yang datang tidak hanya dari internal perangkat daerah tetapi juga faktor-faktor eksternal lainnya.

Indikator Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk terealisasi dengan persentase sebesar 95,92% dari target 100% yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh animo kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sangatlah luar biasa, mengingat Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (WNI) dan wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah wajib untuk memiliki, yang keberadaannya sangat bermanfaat sebagai:

1. KTP merupakan dokumen kependudukan utama yang menjadi bukti resmi identitas diri yang data digunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus berbagai kepentingan dan hak-hak sesorang sebagai penduduk Warga Negara Indonesia.
2. Sebagai akses layanan dasar, misalnya dalam laporan komisi pemberdayaan hukum untuk masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dengan adanya KTP masyarakat miskin mempunyai peluang untuk mengakses berbagai layanan dasar yang disediakan pemerintah, antara lain BLT, dan Beras Untuk Rakyat Prasejahtera dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa diakses dengan syarat harus memiliki KTP.

Namun kendala pada ketersedian blanko KTP yang acap kali tidak tersedia menyebabkan capaian dari indikator ini tidak dapat terealisasi sesuai rencana awal.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah serta mewujudkan perluasan partisipasi publik ini adalah sebanyak 1 program dan 1 kegiatan, yaitu: Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan 1 kegiatan.

1.3 Sasaran III Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur” pada misi “Meningkatkan Profesionalisme Aparatur” dapat dijabarkan sebagaimana tabel:

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur	Predikat AKIP	Kat. Sakip	65	51,78	79,66
	Persentase Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	%	70	68	97,14
Rata – rata capaiankinerja					**88,40**

Dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, keduanya belum mampu mencapai target yang direncanakan sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 88,40%. Namun begitu kategori capaiannya “Tinggi” karena berada pada rentang capaian Lebih dari 76% sampai dengan 90%.

Tabel 3.9

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran III tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Predikat AKIP	100	100	100	79,66
2.	Persentase Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	92,31	92,31	92,31	97,14

Sebagaimana penyajian tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir Indikator Predikat AKIP yang merupakan hasil peniliaian resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengalami peningkatan belum berhasil mencapai target "B" yang direncanakan dan masih tetap memperoleh predikat "CC". Sedangkan untuk Indikator Persentase Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur cenderung mengalami peningkatan capaian yang signifikan bila melihat tren capaian kinerja indikator pada beberapa tahun sebelumnya, sebagaimana yang disajikan pada grafik berikut ini:

Gambar 3.4

Grafik capaian kinerja Sasaran 3 "Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur"

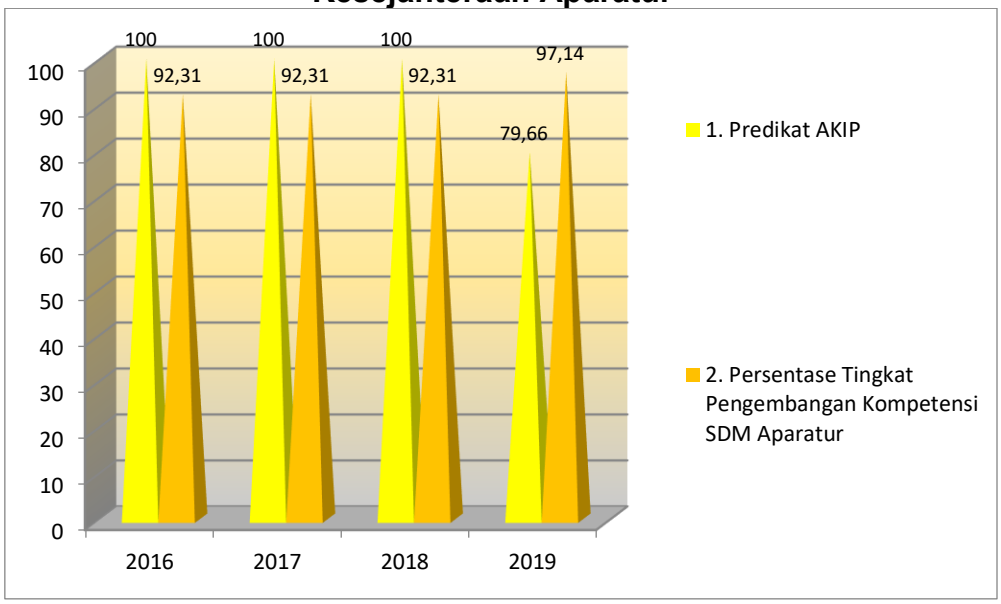

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : 1) Predikat AKIP; 2) Persentase Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur. Indikator Predikat SAKIP terealisasi dengan Predikat Kategori CC dari target B pada tahun 2019, hal ini sangat berkaitan dengan rendahnya kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah yang disampaikan kepada Bappelitbangda Kabupaten Luwu, dimana secara umum hal ini merupakan imbas dari minimnya kapasitas dan kapabilitas ASN dalam tahapan penyusunan hingga penyajian dokumen yang LAKIP. Selain itu terdapat banyak kendala internal perangkat daerah dalam merealisasikan target yang direncanakan mengingat pemanfataan data-data belum dilakukan secara komprehensif .

Untuk meningkatkan Kategori SAKIP indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah dengan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil secara terpadu, konsisten dan menyeluruh.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Profesionalisme dan Kualitas Kesejahteraan Aparatur ini adalah sebanyak 2 program dan 2 kegiatan, yaitu: Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 1 kegiatan, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 1 kegiatan.

2. Capaian Kinerja Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 2 Sasaran yang terdiri dari 6 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

2.1 Sasaran I : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan” pada misi “Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan” dapat dijabarkan sebagaimana tabel:

Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A)	%	81	77	95,06
	Angka rata-rata lama sekolah (SD)	Th	8,3	8,15	98,19
	Angka partisipasi Kasar (APK) SD	%	100	95,16	95,16
	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	- SD/Paket A	%	99,5	93,51	93,98
	- SMP/Paket B	%	93	82,17	88,35
Rata – rata capaian kinerja					**94,15**

Dari empat indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat empat indikator yang tidak mencapai target kinerja. Sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 94,15%, sehingga berada pada kategori “Sangat Tinggi” karena berada pada rentang nilai Lebih dari 91% sampai dengan 100%.

Tabel 3.11

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran I tahun 2019 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A)	31,35	31,3	75	95,06
2.	Angka rata-rata lama sekolah SD	74,9	74,9	86,95	98,19
3.	Angka partisipasi Kasar (APK)	103,8	99,75	99,5	95,16
4.	Angka Partisipasi Murni (APM)				
	- SD/MI/Paket A	98,25	98,97	98,99	93,98
	- SMP/MTS/Paket B	95	95,97	90,98	88,35

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan secara umum mengalami peningkatan. Indikator Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A), mengalami peningkatan pada tahun ini dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 31,3% pada Tahun 2017 dan 75,% di tahun 2018 serta 95,06% di tahun 2019; Indikator Angka rata-rata lama sekolah SD di tahun 2019 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018. Sedangkan Indikator Angka partisipasi Kasar (APK) mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir dan ditahun ini kembali mengalami penurunan Sedangkan untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yakni SD/Paket A dan SMP/Paket B masing-masing cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.5

Grafik capaian kinerja Sasaran I "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan"

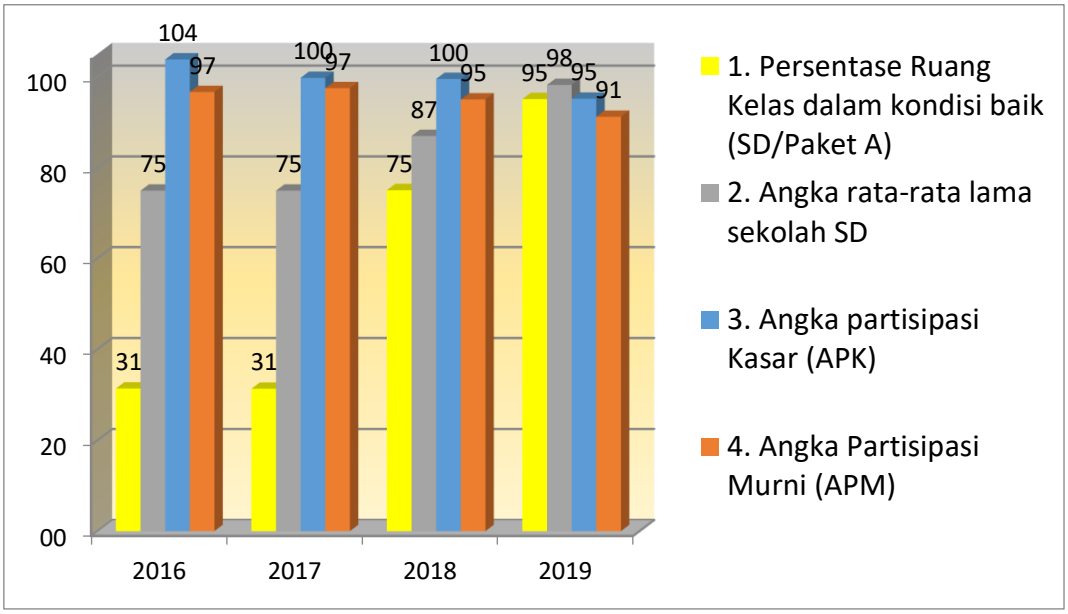

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik (SD/Paket A); 2) Angka rata-rata lama sekolah; 3) Angka partisipasi Kasar (APK); 4) Angka Partisipasi Murni(APM) yakni SD/MI/Paket A dan SMP/MTS/Paket B.

Angka persentase ruang kelas SD dalam kondisi Baik diwilayah Kabupaten Luwu baik cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana hal tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan bantuan pemerintah pusat dengan meningkatkan kualitas perencanaan sehingga keluaran yang diharapkan sesuai dengan ekspektasi.

Diwilayah Kabupaten Luwu capaian angka rata-rata lama sekolah mengalamai peningkatan tiap tahunnya yang tentunya tidak terlepas dari kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang sudah semakin membaik seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan upaya pemerintah dalam menuntaskan pendidikan wajib

dasar bagi masyarakatnya dalam upayanya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pendidikan ini adalah sebanyak 1 program dan 30 kegiatan, yaitu: Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan 30 kegiatan.

2.2 Sasaran II : Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau" pada misi "Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan" Dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Tahun	76,8	70,19	91,39
	Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	%	100	95	95,00
Rata – rata capaian kinerja					**93,20**

Dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, keduanya tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau belum berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 97,44%, namun begitu

kategori capaiannya “Sangat Tinggi” karena berada pada rentang 91% sampai dengan 100%

Tabel 3.13

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran II tahun 2019 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	100,1	94,38	96	91,39
2.	Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani	100	100	100	95

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau cenderung mengalami naik-turun jika melihat tren tiga tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan Indikator Angka Usia Harapan Hidup yang mengalami peningkatan flutuaktif setiap tahun, sedangkan untuk indikator Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani mampu mencapai hasil terbaik ditiap tahunnya namun pada tahun 2019 mengalami penurunan, seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.6

Grafik capaian kinerja Sasaran 2 "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau"

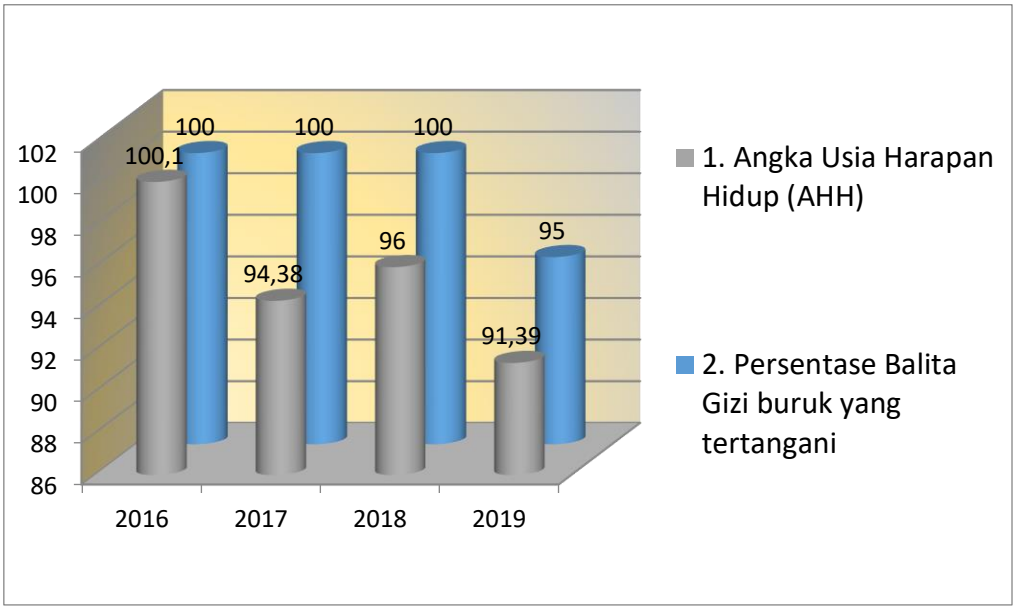

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu: 1) Angka Usia Harapan Hidup (AHH); 2) Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani.

Indikator Angka Usia Harapan Hidup (AHH) terealisasi sebesar 74 tahun dari target 78 Tahun atau sebesar 94,87 persen, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yakni:

1. Kualitas lingkungan
2. Kualitas prilaku/pola hidup
3. Kualitas pelayanan kesehatan

Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan indikator tersebut melalui peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, prilaku/pola hidup dan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lansia, pencegahan terhadap penyakit, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang mendukung lansia.

Indikator Persentase Balita Gizi buruk yang tertangani terjadi peningkatan capaian yang tetap setiap tahunnya sebesar 100 persen. Pemerintah daerah dalam mengentaskan kasus balita gizi buruk setiap tahunnya menggelontorkan sejumlah anggaran sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini. Selain itu oleh pemerintah ada hal yang lebih penting selain melalui penggelontoran anggaran yang seharusnya sejak dini dilakukan, yakni sosialisasi kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Balita Gizi Buruk dan bagaimana penanganannya:

1. Faktor penyebab langsung; dimana Makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang hingga berakibat gizi buruk
2. Faktor tidak langsung; 1)Ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai, dimana setiap keluarga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah yang cukup baik jumlah maupun mutu gizinya. Namun kadang-kadang kebijaksanaan politik maupun ekonomi yang memberatkan rakyat akan menyebabkan hal ini. 2) Pola pengasuhan anak kurang memadai. Setiap keluarga dan masyarakat diharapkan dapat menyediakan waktu, perhatian dan dukungan terhadap anak agar dapat tumbuh kembang dengan baik, baik fisik, mental, dan sosial. Suatu studi mempelajari mengapa dari sekian banyak bayi dan anak balita di suatu desa miskin hanya sebagian kecil yang gizi buruk, padahal orang tua mereka semuanya berprofesi sebagi petani. Dari studi ini diketahui pola pengasuhan anak berpengaruh terhadap timbulnya gizi buruk. Anak yang diasuh ibunya sendiri dengan kasih sayang, mengerti akan pentingnya ASI, Posyandu, kebersihan, anaknya akan lebih sehat. 3) Pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai. Sistem pelayanan kesehatan yang ada diharapkan dapat menjamin penyediaan air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap

keluarga yang membutuhkan. Pelayan kesehatan yang dimaksud yaitu imunisasi, penanganan diare dengan oralit, tindakan cepat pada anak balita yang tidak naik berat badan, pendidikan dan penyuluhan kesehatan dan gizi, dukungan pelayanan di Posyandu, Penyediaan Air Bersih, kebersihan lingkungan, dan sebagainya.

Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani indikator tersebut adalah melalui upaya-upaya peningkatan pengadaan pangan, penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan, peningkatan status sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta peningkatan teknologi hasil pertanian dan teknologi pangan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau ini adalah sebanyak 2 program dan 11 kegiatan, yaitu: program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan 11 Kegiatan.

3. Capaian Kinerja Misi 3 : Membangun Desa Menata Kota

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 Sasaran yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan.

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan” pada misi “Membangun Desa Menata Kota” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.14

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	28,01	21,29	76,01
	Jumlah Pembangunan Jembatan	Unit	35	32	91,43
	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	%	45	40,26	89,47
	Persentase Traffic Light yang berfungsi dengan baik	%	100	60,00	60,00
Rata – rata capaian kinerja					**79,23**

Dari empat indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, keseluruhan indikator belum mampu mencapai target yang direncanakan. Dengan capaian rata-rata kinerja capaian 79,23% capaian kinerja sasaran masih masuk dalam kategori “Tinggi” sehingga karena berada dalam rentang 76% sampai dengan 100%.

Tabel 3.15

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2019 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	81,1	86,83	97,76	76,01
2.	Jumlah Pembangunan Jembatan	100	100	100	91,43
3.	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi	212,25	261,75	262,75	89,47
4.	Persentase Traffic Light yang berfungsi dengan baik	100	85,71	100	60,00

Menelaah tabel diatas, dapat diketahui bahwa Capaian kinerja Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik cenderung mengalami peningkatan di tiga tahun terakhir namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Untuk indikator Jumlah Pembangunan Jembatan juga belum mampu mencapai target yang direncanakan sebelumnya, seperti halnya dengan indikator Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi dan Persentase *Traffic Light* yang berfungsi dengan baik yang juga belum mampu mencapai target yang direncanakan, seperti yang disajikan dalam gambar berikut dibawah ini:

Gambar 3.7

Grafik capaian kinerja Sasaran "Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan"

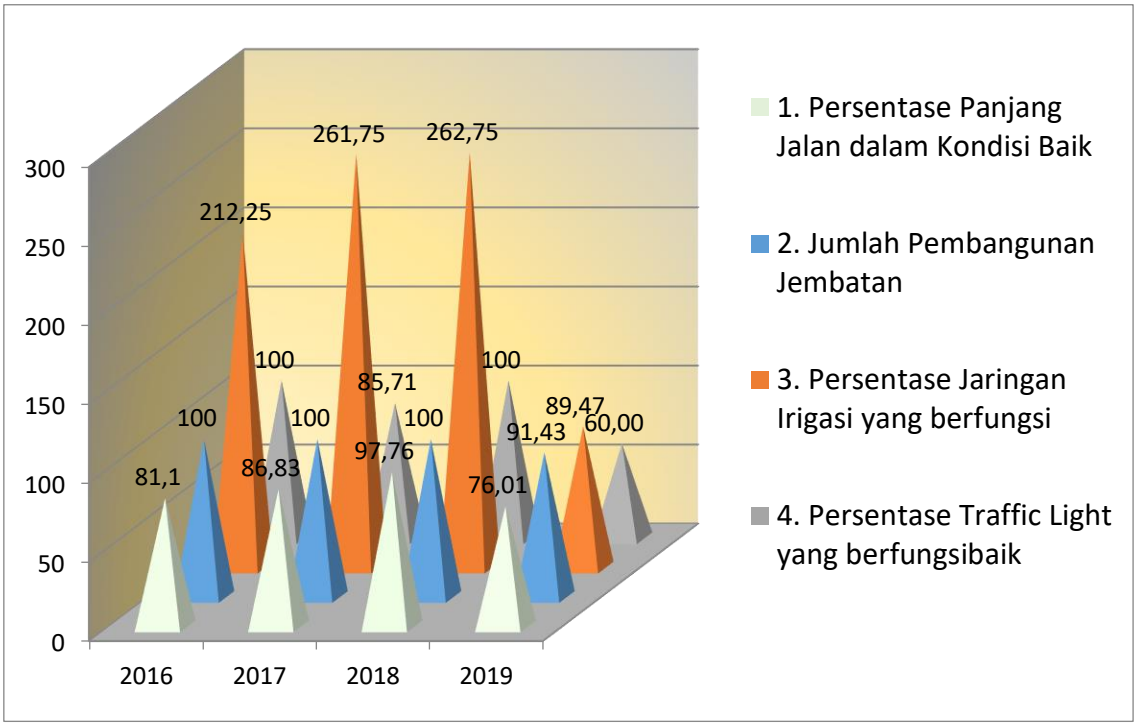

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

Terwujudnya sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu : 1) Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik; 2) Jumlah Pembangunan Jembatan; 3) Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi; 4) Persentase Traffic Light yang berfungsi baik.

Indikator Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik terealisasi dengan persentase sebesar 21,9% dari target 28,61% dimana nilai tersebut menggambarkan capaian kinerja belum sampai pada target yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Mutu/kualitas jalan aspal yang kurang baik yang disebabkan bahan yang dipergunakan tidak baik atau diluar ketentuan teknis. Hal ini yang sering kali menjadi fakor pendukung terjadinya kerusakan lebih cepat.

2. Rendahnya kualitas pengawasan pada pelaksananaan proyek tersebut yang berakibat pada hasil/kualitas pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
3. Air yang mengalir di badan jalan/tidak ada saluran, karena menurut pengalaman, jalan yang sistem pelimpasan buruk akan semakin cepat rusak jalan tersebut. Bisa juga karena air yang menggenang di jalan.
4. Perencanaan yang kurang tepat, karena jenis jalan aspal berbeda maka harus disesuaikan dengan kebutuhan transportasi yang mempergunakan jalan tersebut.

Sehingga untuk meningkatkan indikator tersebut maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menangani permasalahan tersebut, bahwa pembangunan jalan aspal yang baik harus dimulai pada proses perencanaan, pembangunan sampai dengan pemeliharaan agar tercipta jalan dengan kondisi baik dan dapat berfungsi dengan baik pula.

Indikator Jumlah Pembangunan Jembatan terjadi peningkatan capaian setiap tahunnya. Oleh pemerintah hal ini disebabkan karena jembatan tidak hanya dipandang sebagai alat penghubung antara tempat satu dengan tempat yang lain, melainkan sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan manusia, serta membantu berkembangnya suatu daerah yang selama ini sulit di akses. Jembatan sebagai salah satu prasarana transportasi selain jalan raya merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Indikator Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi terjadi peningkatan capaian setiap tahunnya, hal ini terlihat dari capaian tiga tahun terakhir yang tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam membangun Irigasi menjadi komponen yang sangat penting dalam rangka upaya peningkatan hasil pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani, namun juga menjadi kepentingan pemerintah.

Indikator Persentase *Traffic Light* yang berfungsi baik terjadi penurunan capaian dari tahun 2018. Hal ini terjadi karena kelemahan pada proses tindaklanjut laporan dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan pada

kegiatan yang menunjang capaian kinerja indikator ini.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perdesaan serta Sarana dan Prasarana Perkotaan adalah sebanyak 4 program dan 24 kegiatan, yaitu : Program Peningkatan dan Pengawasan Lalu Lintas, Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, Program pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan 24 kegiatan

4. Capaian Kinerja Misi 4 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 Sasaran yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas” pada misi “Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.16

Capaian Kinerja Sasaran “Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	%	84	83,97	99,96

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Berkualitas	Persentase RT bersanitasi	%	89,73	88	98,07
	Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA	%	85	88,24	103,81
Rata – rata capaian kinerja					**100,62**

Mengamati tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari tiga indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat satu indikator yang melampaui target kinerja dan dua indikator yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan, dimana secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas telah berhasil melampaui target, yakni 100,62%, sehingga kategori capaiannya “Sangat Tinggi” karena berada pada rentang capaian 91% sampai dengan 100%.

Tabel 3.17

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2019 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	109,39	99,36	99,42	99,96
2.	Persentase Rumah Tangga bersanitasi	52,6	98,76	98,83	98,07
3.	Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA	94,02	107,2	107,2	103,81

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas ini mengalami peningkatan yang fluktuaktif. Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

mengalami peningkatan yang konsisten bila dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya walaupun belum dapat menyamai capaian pada tahun 2016. Untuk indikator Persentase Rumah Tangga terjadi penurunan capaian kinerja di tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan indikator Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik, yakni 94,02% di tahun 2016 menjadi 107,2 tahun 2017 dan 2018 namun turun di angka 103,81% di tahun 2019, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.8

Grafik capaian kinerja Sasaran "Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas"

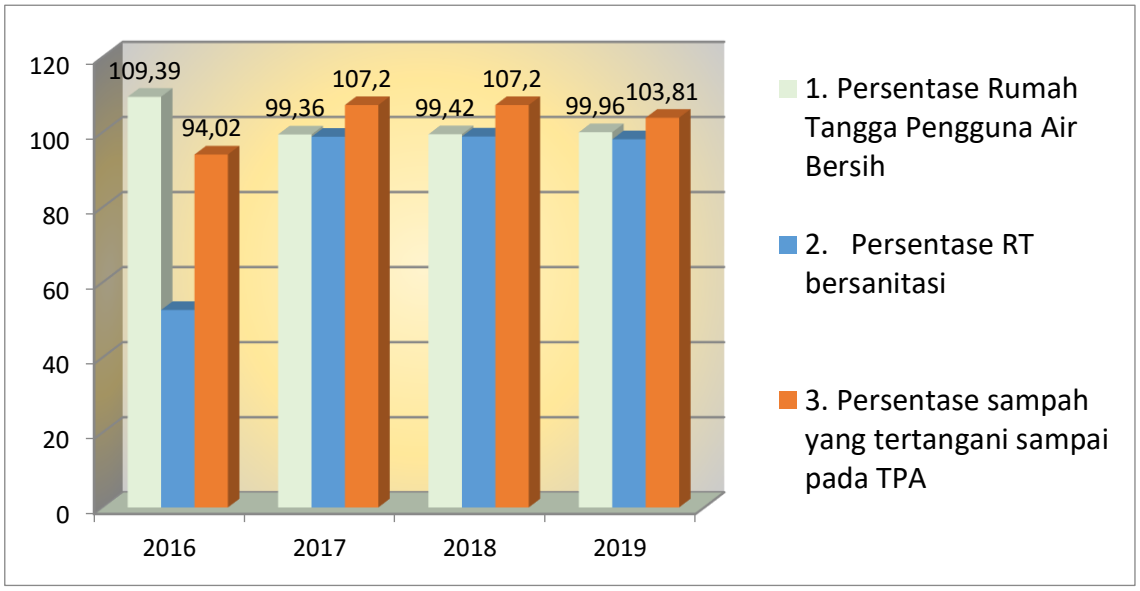

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih; 2) Persentase RT bersanitasi; 3) Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA.

Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih terealisasi dengan persentase sebesar 83,97% dari target 84% di tahun 2019, dimana capaian ini mengalami peningkatan dari tiga tahun sebelumnya yakni 2018, 2017 dan 2016. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya air yang baik dimana telah meratanya penyebaran air, sehingga jarang lagi ditemukan kasus atau laporans sulitnya mengakses

air bersih, terutama pada wilayah perkotaan dan daerah *hinterland*. Untuk mempertahankan indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah adalah Ketersediaan sistem penyediaan air bersih merupakan bagian yang selayaknya tetap menjadi yang terdepan dalam prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan

Indikator Persentase RT bersanitasi terealisasi sebesar 83,97% dari target 84% yang direncanakan untuk tahun 2019 bila di bandingkan tahun sebelumnya capaian ini memang lebih rendah mengingat terdapat beberap hal, yaitu: aspek-aspek pembangunan sanitasi seperti air limbah, persampahan dan drainase, serta penyediaan air bersih, belum memiliki perencanaan terpadu dan belum mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Untuk lebih meningkatkan capaian indikator tersebut diatas, kiranya perlu penyusunan perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Indikator Persentase sampah yang tertangani sampai pada TPA terealisasi sebesar 88,24 dari target 85% yang direncanakan di tahun 2019 atau dengan kata lain capaiannya sebesar 103,81%, sekalipun capaian ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu, namun capaian ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menangani masalah persamapahan di wilayah Kabupaten Luwu. Adapun hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Menurunya efisiensi dan efektifitas pengelolaan persampahan di TPA
2. Menurunnya koordinasi internal dan eksternal antar SKPD, sekertaris/bidang/seksi dalam menata perencanaan dan pengembangan kebijakan kelembagaan, peraturan dan perundangan
3. Menurunnya kewajiban masyarakat membayar retribusi sampah secara kontinyu; dan
4. Kesadaran masyarakat tentang produksi sampah masih rendah.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas ini adalah sebanyak 2 program dan 6 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan 6 kegiatan.

5. Capaian Misi 5 : Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 4 Sasaran yang terdiri dari 8 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

5.1 Sasaran I : Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian

a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian” pada misi “Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.18

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian	Jumlah Produktivitas padi per hektar	Ton/Ha	7,6	6,8	89,47
	Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	55	52,38	95,24
Rata – rata capaian kinerja					**92,36**

Dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini,

kedua indikator belum mampu mencapai target kinerja yang direncanakan sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 92,36% rata-rata capaian sasaran ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”

Tabel 3.19

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran 1 tahun 2019 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Produktivitas padi per hektar	65,73	75,31	104,7	89,47
2.	Kontribusi sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	105,73	106,46	106,61	95,24

Apabila melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian ini mengalami peningkatan dan penurunan. Indikator Jumlah Produktivitas padi per hektar mengalami penurunan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan untuk indikator Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB, capaian kinerja juga turun menjadi 95,24% pada tahun 2019 dari angka 106,61% di tahun 2018, seperti yang disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3.9

Grafik Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian

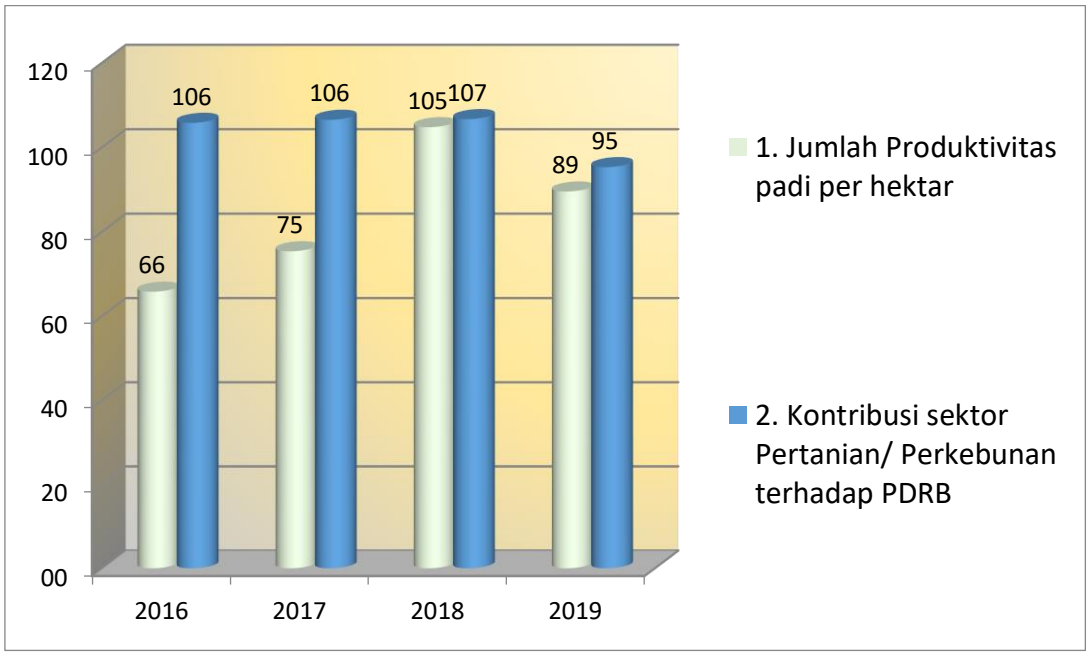

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Produktivitas padi per hektar; dan 2) Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.

Indikator Jumlah Produktivitas padi per hektar terealisasi sebesar 6,8 Ton/Hektar dari target 7,6 Ton/hektar pada tahun 2019, dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan dari tahun 2018 yang terealisasi sebesar 7,10 Ton/Hektar dari target 7,50 Ton/hektar. Hal ini disebabkan karena Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia utamanya Kabupaten Luwu, dimana kebutuhan akan pangan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Namun di lain sisi, upaya peningkatan produksi padi saat ini terhadang oleh banyak kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen dan perubahan iklim eksrtim yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas.

Untuk meningkatkan capaian indikator tersebut maka yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dalam mengoptimalkan sumber daya lahan untuk tanaman padi adalah dengan mempelajari secara obyektif hubungan antara produksi padi di suatu wilayah dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat diketahui faktor yang paling berpengaruh terhadap produksi padi. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor fisik terhadap produktivitas, serta menentukan faktor fisik mana yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap produktivitas.

Indikator Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB juga terjadi penurunan capaian sebesar 95,24% pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 106,61% saja. Hal ini disebabkan karena menurunnya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Luwu terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu tahun 2019.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Usaha Pertanian ini adalah sebanyak 2 program dan 7 kegiatan, yaitu: program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan 7 kegiatan

5.2 Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri” pada misi “Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	PMDN/PMA	14	13	92,86
	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	9	4	44,44
Rata – rata capaian kinerja					**68,65**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, kedua indikator tersebut belum mampu memenuhi target yang direncakanan sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri belum berhasil mencapai target yaitu dengan capaian hanya sebesar 68,65%. Namun begitu kategori capaiannya temasuk dalam kategori “Sedang” karena berada pada rentang capaian 66% sampai dengan 100%.

Tabel 3.21

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran II tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)			
		2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	80	70	83,33	92,86
2.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	100	100	100	44,44

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri ini mengalami peningkatan yang flutuaktif. Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) menyamai

pada capaian tahun lalu, yakni sebesar 83,33%, dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yaitu 70% pada tahun 2017 dan tetap 80% tahun 2016, dan untuk indikator Jumlah perda yang mendukung iklim usaha selama tiga tahun berturut turut konsisten berada diangka 100% namun pada tahun 2019 hanya mencapai 44,44%, sebagaimana yang di sajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 3.10

Grafik Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri"

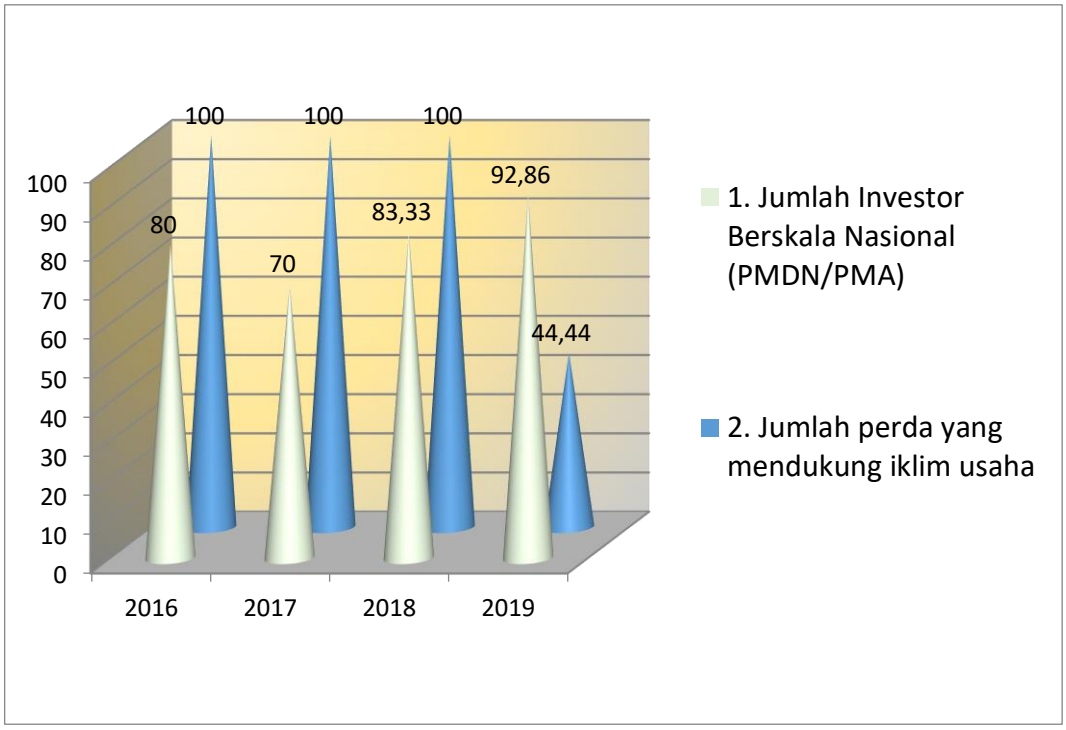

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Industri terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu: 1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA); dan 2) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha.

Indikator Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) terealisasi sebanyak 10 PMDN/PMA dengan target 12 PMDN/PMA sehingga persentase capaiannya sebesar 92,86%, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan dari dua tahun sehingga pemerintah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi penghambat indikator tersebut diatas seperti:

1. Penyederhanan Proses Administrasi **;** rentang birokrasi di daerah yang terlalu panjang, ini telah mengakibatkan biaya yang mahal serta terbuka peluang korupsi atau pungutan liar yang dapat mengakibatkan buruknya iklim investasi
2. Optimalisasi implementasi otonomi daerah **;** masalah pajak dan retribusi daerah yang mengakibatkan kegiatan investasi menjadi *unpredictable*.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan permasalahan kebijakaan ketenagakerjaan : tingkat pendidikan dan rendahnya kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia telah menjadi salah satu pertimbangan investor untuk sberinvestasi di daerah.
4. Peningkatan jaminan dan perlindungan investasi **;** Meskipun UU Penanaman modal telah mengaturjaminan dan perlindungan terhadap kegiatan investasi dan pemerintah secara aktif menyepakati berbagai perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan investasi, namun dalam prakteknya kurang terlihat komitmen yang sungguh-sungguh dalam perlindungan investasi
5. Penguatan koordinasi antar kelembagaan; Ketidakjelasaan tupoksi dari lembaga pemerintahan telah menimbulkan koordinasi yang tidak harmonis dalam konteks kegiatan investasi. Terlebih kondisi di daerah kerap terjadi saling lempar tanggung jawab antar dinas. Kordinasi yang kurang terjadi oleh adanya pertimbangan subyektif yang berlatar belakang kepentingan suatu kelompok (politis) maupun ekonomi.

Kemudian pemerintah daerah meranmu lima permasalahan diatas untuk menjadi program percepatan penanaman modal. Keenam permasalahan tersebut kemudian harus mampu diselesaikan secara baik oleh pemerintah, guna meningkatkan arus masuk investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Luwu.

Indikator Jumlah perda yang mendukung iklim usaha terjadi penurunan dari capaian tahun lalu, dimana hal ini terjadi akibat menurunnya kinerja perangkat daerah terkait dalam mempercepat penyusunan dan mendorong pembahasan ranperda terkait.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan ini adalah sebanyak 3 program dan 7 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan 2 kegiatan, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan 1 kegiatan dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan 4 kegiatan

5.3 Sasaran III : Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan

a. Capaian kinerja

Capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan" pada misi "Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah" dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.22

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	35.000	19.250	55,00
	Persentase Koperasi Aktif	%	15	11,03	73,53
Rata – rata capaian kinerja					**64,27**

Melihat tabel diatas, dapat diketahui bahwa kedua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini belum mampu melampaui atau menyamai target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan tetap termasuk dalam kategori

"Rendah" karena berada pada rentang capaian 51% sampai dengan 65%.

Tabel 3.23

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran III tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	3,09	2,64	93,84	55,00
2.	Persentase Koperasi Aktif	400,67	409,71	440,09	73,53

Merujuk pada tabel diatas, diketahui bahwa capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan ini mengalami peningkatan dan penurunan secara bersamaan yang sifatnya signifikan. Indikator Jumlah Usaha Mikro dan Kecil mengalami mengalami banyak penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan untuk indikator Persentase Koperasi Aktif sebaliknya terjadi penurunan yang sangat singnifikan bila melihat capaian yang tinggi pada tahun sebelumnya, seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.11

Grafik Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan"

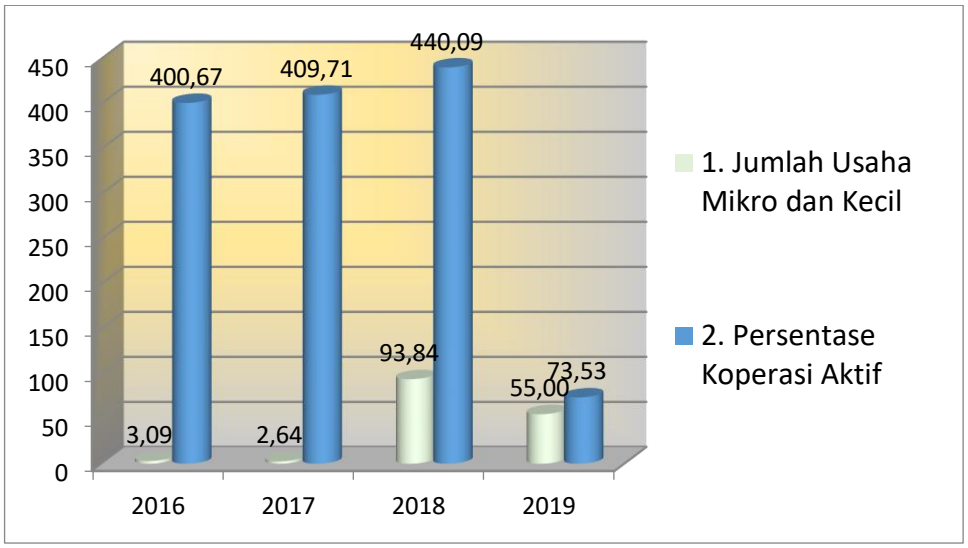

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Usaha Mikro dan Kecil; dan 2) Persentase Koperasi Aktif. Indikator Jumlah Usaha Mikro dan Kecil terealisasi dengan persentase sebesar 55% ditahun 2019, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 93,84%. Hal ini disebabkan karena UKM di Kabupaten Luwu sudah mengalami peningkatan terutama dalam hal sumber daya manusia dan penguasaan teknologi namun pemerintah daerah harus sungguh-sungguh menciptakan iklim yang tidak bias terhadap UKM dan membantu sepenuhnya UKM dalam menanggulangi berbagai macam hambatan yang dihadapi oleh kelompok usaha kecil (UKM).

Sedangkan Indikator Persentase Koperasi Aktif terjadi peningkatan penurunan capaian kinerja bila dilihat capaian tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh beberapa faktor teknis diantaranya:

1. Menurunnya angka partisipasi anggota
2. Rendahnya Solidaritas antar anggota koperasi; dengan ikatan ekonomi, Ikatan solidaritas bisa dibangun secara lebih kongkrit.
3. Menurunnya pertumbuhan perkembangan modal, dimana faktor ini sangat mempengaruhi perkembangan usaha koperasi sebab dengan modal yang cukup besar dapat mengembangkan usahanya yang lebih banyak lagi.
4. Moral dan kapasitas pengurus koperasi yang terkikis bahwa permasalahan korupsi yang terjadi di koperasi kebanyakan disebabkan oleh tindakan kepengurusan yang kuran professional.

Sehingga untuk kembali meningkatkan capaian-capaian indikator tersebut pemerintah kabupaten perlu mengupayakan pembentukan badan pengawas yang berperan aktif dan lebih dalam mengawasi segala aktivitas dan keuangan yang berkaitan dengan kegiatan

kepengurusan dan anggota, seleksi ketat dalam perekrutan anggota, memberikan pelatihan secara moral dan nyata tentang profesionalitas pengurus koperasi dan yang paling penting selalu menerapkan pentingnya kejujuran dan kedisiplinan dalam suatu koperasi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Wirausahawan ini adalah sebanyak 3 program dan 7 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan 2 kegiatan, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan 1 kegiatan dan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan 4 kegiatan.

5.4 Sasaran 4 : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan” pada misi “Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.24

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan	Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya)	Ton	700.000	644.357	92,05
	Cakupan bina kelompok nelayan	Klp	70	72,2	103,14
Rata – rata capaiankinerja					**97,60**

Dari dua indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, keduanya belum mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan

sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan adalah sebesar 97,60%, sehingga kategori capaiannya “Sangat Tinggi” karena berada pada rentang capaian 91% sampai dengan 100%.

Tabel 3.25

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Produksi Perikanan (Tangkap + Budidaya)	104,05	97,73	100,35	92,05
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	192,31	192,31	192,31	103,14

Melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan ini mengalami cenderung fluktuatif. Indikator Produksi Perikanan (Tangkap+Budidaya) mengalami penurunan pada tahun ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Begitu juga untuk indikator Cakupan bina kelompok nelayan selama tiga tahun berturut turut tetap bertahan di 192,31% namun mengalami penurunan capaian pada tahun ini, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel gambar dibawah ini:

Gambar 3.12

Grafik Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan"

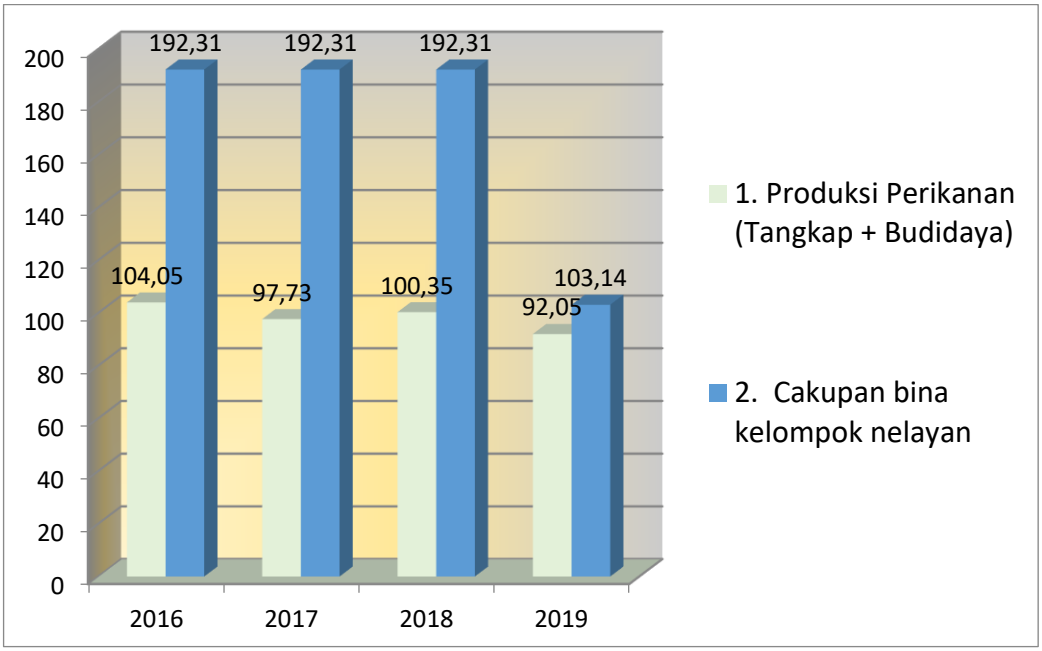

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan terdiri dari dua indikator kinerja yaitu: 1) Produksi Perikanan (Tangkap+Budidaya); dan 2) Cakupan bina kelompok nelayan. Indikator Produksi Perikanan (Tangkap+Budidaya) dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan namun mengalami penurunan pada tahun ini, hal ini disebabkan karena tingkat pemanfaatan Sumber daya kelautan dan perikanan yang belum optimal, dan penyaluran bantuan-bantuan alat tangkap ikan yang kurang tepat sasaran.

Indikator Cakupan bina kelompok nelayan terjadi peningkatan tetap di tahun 2016 hingga tahun 2018 masing-masing sebesar 50 kelompok nelayan namun juga mengalami penurunan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Kegiatan Kasus-kasus pemberdayaan yang biasa kita temui mengalami kemajuan dalam mencapai tujuan kemandirian masyarakat namun dilaksanakan secara instan dan masih berorientasi proyek. Guna menindaklanjuti hal tersebut pemerintah harus mampu memahami struktur masyarakat

nelayan, tidak hanya melihat aspek ekonomi atau teknologi saja, melainkan juga aspek sosial budaya perlu diperhatikan, dimana penyuluhan memiliki dampak luas apabila dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan berkonsentrasi kepada membentuk perubahan perilaku melalui berbagai prinsip pengetahuan dan pengalaman dengan masyarakat. Selain itu kegiatan penyuluhan sebagai implementasi komunikasi pembangunan adalah dengan membantu nelayan untuk mengambil keputusan sendiri dengan cara menambah pilihan bagi mereka, menolong mereka mengembangkan wawasan mengenai konseksuensi dari masing-masing pilihan tersebut.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Perdesaan ini adalah sebanyak 2 program dan 11 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dengan 11 kegiatan.

6. Capaian Misi 6 : Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 Sasaran yang terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

Sasaran : Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana” pada misi “Menjaga Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	95	85	89,47
Rata – rata capaian kinerja					**89,47**

Dari satu indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, indikator tersbut tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana belum berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 89,47%, namun begitu kategori capaiannya termauk "Tinggi" karena berada pada rentang capaian 76% sampai dengan 100%.

Tabel 3.27

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun 2019 dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	89,26	89,26	89,26	89,47

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana cenderung statis dan baru mengalami peningkatan pada tahun 2019, dimana Indikator Persentase Ketaatan terhadap RTRW selama tiga tahun terakhir sebesar 89,26% dan pada tahun ini mencapai 89,47% seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.13
Grafik capaian kinerja Sasaran "Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana"

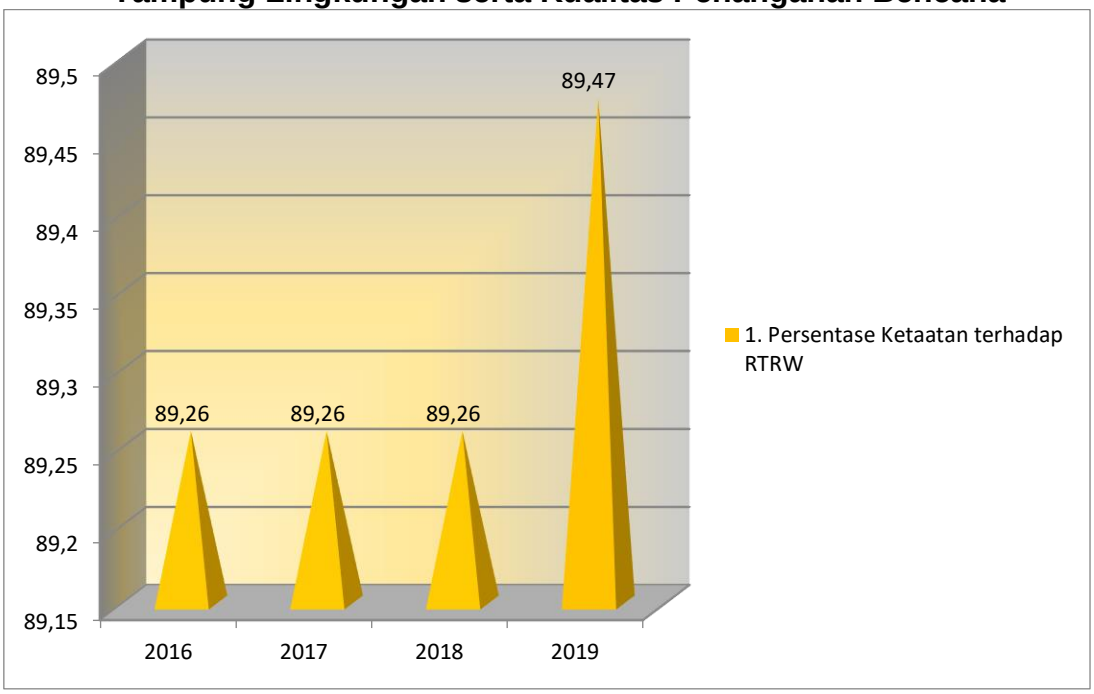

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu : 1) Persentase Ketaatan terhadap RTRW.

Indikator Persentase Ketaatan terhadap RTRW terealisasi dengan persentase capaian sebesar 86,5% dari target 95% tahun 2019. Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031 yang masih dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang karena hasil penilaian Peninjauan Kembali bernilai 86,5 persen yang berarti masih diatas standar ketaatan terhadap RTRW.

Untuk indikator tersebut diatas yang dilakukan pemerintah daerah adalah RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031 yang telah berjalan tujuh tahun telah dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Luwu agar sedini mungkin dapat diketahui apakah Rencana Tata Ruang yang berlaku masih dapat digunakan sebagai dasar untuk pemanfaatan ruang sehingga tujuan pemanfaatan ruang dapat diwujudkan, atau perlu diperbaiki. Apabila perlu diperbaiki, maka RTRW Kabupaten Luwu selanjutnya harus direvisi.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Kualitas Penanganan Bencana ini adalah sebanyak 2 program dan 5 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan Hutan dan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan 5 kegiatan.

7. Capaian Misi 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dalam mewujudkan misi tersebut maka pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu menetapkan 1 Sasaran yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama. Capaian dari sasaran dan indikator kinerja utama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum” pada misi “Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat” dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum	Persentase Kepatuhan terhadap Perda	%	100	100	100
	Cakupan patroli petugas satpol PP	Kali	80	80	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata – rata capaian kinerja					**100**

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, terdapat dua indikator yang mencapai target kinerja. Dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen.

Tabel 3.29

Perbandingan antara capaian kinerja Sasaran tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			
		2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Kepatuhan terhadap Perda	100	100	100	100
2.	Cakupan patroli petugas satpol PP	100	100	100	100

Melihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka capaian kinerja indikator pada sasaran Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum ini berhasil konsistem mempertahankan capaian kinerjanya setiap tahun, seperti yang disajikan pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.14

Grafik capaian kinerja Sasaran "Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum"

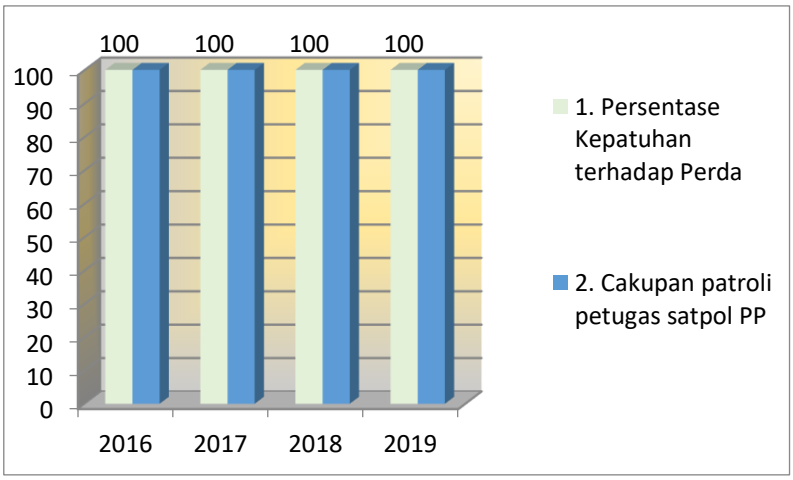

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu: 1) Persentase Kepatuhan terhadap Perda; 2) Cakupan patroli petugas satpol PP.

Indikator Persentase Kepatuhan terhadap Perda terealisasi dengan persentase sebesar 100 persen dari target 100 persen, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan tetap dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan karena pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Komunikasi; Arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah.
2. Sumberdaya; dukungan sumber daya maupun stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah
3. Perilaku; Diperlukan pula nilai-nilai yang dapat dianut atau dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang harus di implementasikan.
4. Struktur Birokratik; Diperlukan pula pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas di daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan di daerah.

Untuk mempertahankan indikator tersebut maka pemerintah daerah dalam melakukan formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi.

Indikator Cakupan patroli petugas satpol PP juga terjadi peningkatan tetap selama 3 tahun terakhir yakni sebesar 100 persen. Dimana kinerja pelayanan publik Polisi Pamong Praja sudah baik selama tiga tahun terakhir. Hal ini disebabkan antara lain adalah; pertama, adanya sistem insentif untuk melakukan perbaikan. Kedua, baiknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan publik, yang

ditandai dengan tidak adanya tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan dalam melakukan tugas pelayanan.

Sehingga untuk mempertahankan indikator ini, dalam mengatasi masalah pelayanan publik sudah seharusnya menjadi program pemerintah yang harus secara terus menerus ditingkatkan pelaksanaannya.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Stabilitas Keamanan Kesadaran Politik dan Hukum ini adalah sebanyak 2 program yaitu Program Satuan Tugas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan 1 kegiatan, dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan 2 kegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dan untuk mencapai terciptanya kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakatnya, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk memaksimalkan kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud tersebut, diperlukan dukungan dana yang memadai, yang dikelola oleh sumber daya aparatur yang profesional dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Terlebih lagi dengan pengimplementasian sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka beban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat semakin besar pula. Hal ini membawa konsekuensi logis semakin tingginya kebutuhan daerah terhadap ketersediaan dana pembangunan yang besar.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu senantiasa mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnyaPendapatanAsli Daerah (PAD), karena pengelolaan pemungutan PAD masuk kedalam ranah kebijakan pemerintah daerah sendiri dan tidak sebagaimana Dana Perimbangan yang lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan, suksesnya pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan, olehnya itu diharapkan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah diarahkan pada upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, serta proses yang sederhana dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepatutan, potensi dan karakteristik daerah, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30

Realisasi Pendapat Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2018	Realisasi 2019
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**Rp106.865.730.000**	**Rp113.777.210.000**
1.1.1	Pajak Daerah	Rp23.225.730.000	Rp25.548.760.000
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp8.262.080.000	Rp7.568.410.000
1.1.3	Hasil Pengalolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp5.146.300.000	Rp5.462.260.000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp70.231.620.000	Rp75.197.780.000
1.2	**Dana Perimbangan**	**Rp310.387.720.000**	**Rp1.043.484.270.000**
1.2.1	Dana Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	Rp15.973.080.000	Rp13.831.260.000
1.2.2	Dana alokasi umum	Rp68.021.380.000	Rp718.676.590.000
1.2.3	Dana alokasi khusus	Rp226.393.260.000	Rp310.976.420.000
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**Rp293.677.430.000**	**Rp307.823.740.000**
1.3.1	Pendapatan Hibah	Rp51.717.050.000	Rp49.417.150.000
1.3.2	Dana Darurat		

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2018	Realisasi 2019
1..3.3	Bagi hasil pajak dan provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	Rp4.281.290.000	Rp55.518.010.000
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	Rp192.040.060.000	Rp195.242.490.000
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	Rp7.107.410.000	Rp764.610.000
A	**TOTAL PENDAPATAN**	**Rp710.930.880.000**	**Rp1.465.085.220.000**

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu masing-masing bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2019, Pendapatan PAD mencapai Rp. 1.465.085.220,-

2. Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2019 telah merencanakan Belanja Daerah sesuai dengan urgensi capaian visi dan misi kepala daerah sebagaiamana yang terumuat didokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang menjabarkan bahwa arah kebijakan arah kebijakan Belanja Daerah berfokus pada:

a) Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
b) Pembangunan dan Peningkatan Sarana & Prasarana
c) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Penguatan Kelembagaan
d) Lain-lain dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah

Adapun struktur belanja daerah dapat dilhat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.31

Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah	
		Realisasi 2018	Realisasi 2019
2.1	**Belanja Tidak Langsung**		
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp489.997.520.000	Rp507.005.540.000
2.1.2	Belanja Bunga		
2.1.3	Belanja Subsidi		
2.1.4	Belanja Hibah	Rp45.452.080.000	Rp781.870.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	Rp38.270.000	Rp86.650.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp2.881.320.000	Rp2.842.210.000
	Belanja Bantuan Keuangan provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp238.416.520.000	Rp27.026.680.000
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	Rp60.270.000	Rp480.160.000
2.2	**Belanja Langsung**		
2.2.1	Belanja Pegawai	Rp10.344.140.000	Rp975.410.000
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp346.509.580.000	Rp351.620.460.000
2.2.3	Belanja Modal	Rp19.981.440.000	Rp297.964.360.000
Total Belanja		**Rp1.333.858.530.000**	**Rp1.448.618.830.000**

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Realisasi komponen Belanja pada tahun 2019 mencapai Rp. 1.448.618.830.0000, dimana angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp114.760.300.000 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2018. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah kedepannya agar mampu mengoptimalkan capaian kinerja mengingat komponen Belanja Daerah cenderung meningkat tiap tahunnya.

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Luwu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 13 sasaran yang mencakup 30 indikator sasaran secara umum sudah sangat baik, dimana diketahui bahwa terdapat **21 indikator atau 70,0% dengan kategori capaian "Sangat Tinggi"**, **5 indikator atau 16,7% dengan kategori "Tinggi"**, **1 indikator dengan kategori "Sedang"**, **2 Indikator atau 6,7% berkategori "Rendah"** dan **hanya 1 indikator atau sama dengan 3,3% dengan kategori "Sangat Rendah"**

A. Permasalahan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, permasalahan yang dihadapi secara umum meliputi:

1) Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung dan mengakselerasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Luwu relatif lebih besar dibandingkan dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah.
2) Kemampuan daya serap pada pelaksanaan beberapa program dan kegiatan rata-rata belum mencapai target yang telah ditetapkan setiap triwulan.
3) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah selalu mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan pengelolaan keuangan daerah.
4) Kemampuan aparat dalam mengimplementasikan berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relatif terbatas, sehingga perlu dilakukan peningkatan sumber daya aparatur dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

5) Dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024 ditemukan bahwa terdapat beberapa indikator yang tertuang didalam LKjIP Tahun 2019 ini yang perlu dievaluasi akurasinya, antara lain karena penggantian formula pengukuran atau komponen-komponen pembentuk suatu indikator, verfikasi lapangan, dan lain-lain.

B. Solusi

Terhadap identifikasi permasalahan yang timbul, maka alternatif solusi terhadap kondisi tersebut, adalah menetapkan langkah-langkah taktis dan strategis sebagai berikut :

1) Perlu perencanaan yang lebih matang dan komprehensif untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas.
2) Koordinasi antar instansi perlu ditingkatkan dalam menetapkan sasaran kinerja masing-masing unit kerja, sehingga tidak terjadi lagi program/kegiatan yang sama pada unit kerja yang berbeda.
3) Perlu peningkatan upaya optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang agar dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah.
4) Perlunya peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.
5) Perlu terus dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6) Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen LKjIP Kabupaten Luwu Tahun 2020 disusun berdasarkan:
    a. Perjanjian Kinerja masing-masing jabatan struktural pada seluruh perangkat daerah;
    b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2024;
    c. Hasil evaluasi RKPD Kabupaten Luwu 2020 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Luwu

Tahun 2014-2019 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, belum terpenuhi sesuai dengan harapan. Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Belopa, April 2020

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG